



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, perlu pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
- (2) Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pendidikan tingkat daerah yang bersifat komprehensif dan strategis sebagai rujukan penyusunan rencana pendidikan yang lebih teknis di tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sistematika Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Kondisi Umum Pendidikan
 - Bab III : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Berbasis Budaya Jangka Panjang
 - Bab IV : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2018
 - Bab V : Program Startegis Pembangunan Pendidikan Tahun 2014 – 2018
 - Bab VI : Target Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Tahun 2014 – 2018
 - Bab VII : Penutup

Pasal 3

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan wajib menyusun Rencana Strategis dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu pusat peradaban dan kebudayaan selama berabad-abad dan terbukti memiliki andil besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peninggalan-peninggalan historis seperti candi-candi Hindu dan Budha baik besar maupun kecil membuktikan majunya peradaban Mataram kuno ratusan tahun yang lampau. Hal ini diperkaya dengan dinamika kelahiran dan perkembangan kerajaan Islam Mataram yang masih menunjukkan eksistensinya hingga kini dan dalam perjalanan sejarah berinteraksi pula dengan peradaban bangsa lain seperti Eropa, China dan Jepang. Pengalaman historis tersebut membentuk modal budaya dan modal sosial yang kaya dan unik sebagai bumi kelahiran pemikiran pendidikan yang fenomenal seperti pola pendidikan Kraton dan Pakualaman, Muhammadiyah, dan Taman Siswa di tengah masyarakat yang kaya dengan model pesantren dan model pendidikan persekolahan. Pada awal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di DIY berdiri pula pendidikan tinggi negeri dan swasta, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian diikuti dengan banyaknya anak bangsa dari Sabang sampai Merauke dengan bangga menempuh pendidikan di DIY. Fenomena ini memperkaya khasanah sosial-budaya DIY sebagai miniatur Indonesia sehingga menjadi sebuah kenyataan dan kebenaran yang tumbuh alami, modal dan model pendidikan berkarakter atau dengan keunikan karakteristik yang cocok untuk suatu masyarakat majemuk.

Pendidikan yang terjadi secara alami dikuatkan dengan sinergi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh sistem persekolahan sampai tingkat perguruan tinggi, pendidikan agama dan keagamaan (pesantren/seminari), berbagai kursus dan diklat, beserta lingkungan masyarakat Jawa yang menyediakan akomodasi dan lingkungan pendidikan yang sehat di dalam iklim kemajemukan. Nilai-nilai luhur

budaya Jawa yang tetap tampil dengan identitasnya mampu berinteraksi dan berakulturasi dengan berbagai budaya nasional lainnya serta budaya dari bangsa-bangsa lain yang hadir di DIY. Dengan kata lain modal sosial dan budaya di DIY telah terbentuk dan terbukti sangat kuat peran positifnya terhadap perkembangan pendidikan termasuk perkembangan pendidikan di tanah air. Alumni dari DIY telah menunjukkan peran penting dalam memajukan pembangunan di berbagai daerah dan banyak pula berperan pada tingkat nasional.

Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencanangkan rencana pembangunan jangka panjang yang tertuang pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Dalam RPJPD tersebut ditegaskan bahwa visi pembangunan DIY yang akan dicapai adalah *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

Visi pembangunan DIY tersebut dijabarkan ke dalam empat misi sebagai berikut: (1) mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal; (2) mewujudkan budaya adhilihung yang didukung dengan konsep pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; (3) mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan (4) mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka implementasi RPJPD DIY Tahun 2005-2025 tersebut pelaksanaannya ditetapkan melalui empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama tahun 2005-2009: penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan.
2. Tahap kedua tahun 2010-2014: penekanan pada pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.

3. Tahap ketiga 2015-2019: penekanan pada lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.
4. Tahap keempat 2020-2025: penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Berdasarkan rumusan RPJPD 2005-2025, tampak jelas bahwa budaya memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia serta lingkungan pendukung yang akan membantu serta mendorong terwujudnya manusia yang berbudaya. Pembangunan DIY yang dilandasi dengan Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Diperlukan orang-orang yang bersifat satriya untuk mendukung DIY sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Dalam rangka upaya mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Peraturan Daerah ini mengamanatkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di DIY berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Dengan tema ini dimaksudkan dan diyakini bahwa dengan karakteristiknya pendidikan DIY tetap mendapatkan posisi dan peran penting dalam pembangunan pendidikan nasional dan membuka peluang juga untuk diperhitungkan di kawasan regional ASEAN. Salah satu amanat yang tertuang dalam perda tersebut adalah perlunya penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur sehingga pengembangan pendidikan di DIY ke depan lebih sistemik dan terarah.

B. PARADIGMA PEMBANGUNAN PEDIDIKAN

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, di masa depan DIY diharapkan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia, dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel berstandar nasional ataupun bertaraf internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. Secara umum, kondisi demikian dapat dicapai dengan memperkuat aspek-aspek nilai luhur budaya. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia dan masyarakat serta lingkungan pendukungnya yang akan membantu atau mendorong manusia yang berbudaya menjadi manusia yang bersifat satriya yang dapat mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Pemahaman terhadap falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* (sebagai visi), *Golong Gilig* (sebagai semangat), dan *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* (sebagai *wataking satriya Ngayogyakarta*) perlu diwujudkan dalam konteks pendidikan secara luas, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal. Pemahaman falsafah tersebut diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan karakter atau watak manusia berbudaya yang mampu mengembangkan kebudayaan dalam kehidupannya. Hal ini mengandung makna yang sangat penting, karena DIY menjadi *cadradimuka* baik bagi masyarakatnya sendiri maupun bagi masyarakat pendatang. Selanjutnya akan muncul manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan manusia berbudaya yang berwatak satriya tersebut, perlu menafsirkan dan menerapkan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang dikenal dengan nama “sepuluh fatwa untuk hidup merdeka” sebagaimana dikutip oleh Hamengku Buwono X ketika menyampaikan pidato utama pada pembukaan Konggres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012. Adapun fatwa tentang sendi hidup merdeka tersebut adalah :

1. *Lawan sastra ngesti mulya*, artinya dengan ilmu menuju kemuliaan, merupakan cita-cita untuk kemuliaan nusa, bangsa, dan rakyatnya;

2. *Suci tata ngesti tunggal*, artinya dengan kesucian menuju kesempurnaan sebagai janji yang harus diamalkan oleh setiap pejuang;
3. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia, artinya untuk menjadi hidup merdeka atas dasar ajaran setiap agama, pada prinsipnya semua manusia sama-sama haknya maupun kewajibannya;
4. Salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat, artinya sebagai sebuah peringatan bahwa kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan dan keselamatan masyarakat;
5. Kodrat alam petunjuk untuk hidup sempurna, artinya sebagai pengakuan bahwa petunjuk dalam kodrat alam, harus kita jadikan pedoman hidup, baik sebagai individu maupun bangsa dan anggota dari alam kemanusiaan;
6. Alam hidup manusia adalah alam berbulatan, artinya hidup kita itu ada dalam lingkungan berbagai alam-alam khusus yang saling berhubungan dan berpengaruh. Rasa diri, rasa bangsa, dan rasa kemanusiaan, ketiganya hidup dalam sanubari manusia;
7. Dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati berhambalah kepada sang anak, artinya bahwa penghambaan kepada anak tidak lain dari pada penghambaan kepada diri kita sendiri untuk mencari rasa bahagia dan damai dalam jiwa, di samping juga menghambakan diri kepada bangsa, negara, rakyat, dan agama;
8. *Tetep-mantep-antep*, artinya dalam melaksanakan perjuangan harus berketetapan hati, tekun bekerja dan harus tetap tertib dan berjalan maju. Selalu 'mantep', setia dan taat pada asas, teguh iman agar tidak ada kekuatan yang dapat menahan gerak dan membelokkan aliran kita, kemudian segala perbuatan akan 'antep', maksudnya berharga, tidak mudah dihambat atau dilawan orang lain;
9. *Ngandel-kendel-bandel-kandel*, artinya harus ngandel, yaitu percaya dan yakin kepada kekuasaan Tuhan dan diri sendiri. Kendel, artinya berani tiada ketakutan dan was-was oleh karena kepercayaan yang sama. Bandel, artinya tahan dan tawakal, dengan demikian akan menjadi 'kandel', yaitu tebal kuat lahir batin untuk berjuang mencapai cita-cita;
10. *Neng-Ning-Nung-Nang*, artinya 'meneng' tenteram lahir batin tidak ragu dan malu-malu. Kemudian 'ning' atau 'wening', bening jernih pikiran, sehingga mudah membedakan yang hak dan yang batil maka kita jadi 'nung' atau 'hanung', artinya kuat sentosa kokoh lahir batin untuk mencapai cita-cita. Akhirnya 'nang',

menang dan dapat wewenang, berhak dan kuasa atas pencapaian usaha.

Keinginan melakukan penguatan dan pencerahan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan ini diperkuat dengan adanya fenomena perilaku manusia yang menunjukkan ketidakharmonisan antara perkembangan intelektual dengan perkembangan moral dan karakter yang menggejala serta marak di negeri ini. Oleh karena itu muncul keinginan yang semakin kuat untuk menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan berbasis budaya. Jika keinginan tersebut dapat terwujud maka DIY akan menjadi acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumberdaya manusia di tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Nilai-nilai budaya Jawa diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam mendasari pendidikan di DIY.

Sebagai upaya untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan berbasis budaya, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berkualitas dan cerdas baik secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal dalam kerangka kemajemukan masyarakat (multikultural) dan dalam konteks global. Manusia Indonesia seutuhnya yang berkualifikasi demikian dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya yang memadai.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018 ini adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- h. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - r. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
 - x. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
 - y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

D. SISTEMATIKA

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum Pendidikan
- Bab III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang
- Bab IV : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Tahun 2014-2018
- Bab V : Program Strategis Pembangunan Pendidikan Tahun 2014 – 2018
- Bab VI : Target Renstra Pembangunan Pendidikan Tahun 2014-2018
- Bab VII : Penutup

E. BATASAN ISTILAH KUNCI

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
3. Pengelolaan pendidikan berbasis budaya adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan berbasis budaya pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia berkarakter bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam kancah dunia guna mencapai kesejahteraan bangsa.

BAB II
KONDISI UMUM PENDIDIKAN

A. ANALISIS SITUASI PENDIDIKAN DIY

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi dengan 4 Kabupaten dan 1 kota yang terdiri atas 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 3.185.80 km². Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Indonesia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sebelah barat laut dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, dan sebelah tenggara dengan Kabupaten Wonogiri.

Dilihat dari aspek demografi, jumlah penduduk DIY pada tahun 2011 adalah 3.449.123 orang. Dibandingkan dengan data pada tahun 2010, penduduk DIY berkembang sekitar 0,6 % dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.083 jiwa/ km². Kondisi demografi tersebut terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan Demografi DIY Tahun 2011

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1	Penduduk seluruhnya	3.449.123	6	Kepandaian Membaca/menulis	
2	Penduduk 7-12 th	277.987		a. Dapat membaca	1.918.773
3	Penduduk 13-15 th	134.311		b. Buta Huruf	35.646
4	Penduduk 16-18 th	159.267	7	Angkatan Kerja	
5	Tingkat pendidikan penduduk			a. Bekerja	1.794.668
	a. Tidak/belum pernah sekolah	122.926		b. Mencari pekerjaan	85.996
	b. Tidak/belum tamat SD	168.316	8	Bukan Angkatan Kerja	
	c. Tamat SD	376.517		a. Bersekolah	304.201
	d. Tamat SMP	382.677		b. Rumah Tangga	360.599
	e. Tamat SMA	299.476		c. Lain-lain	107.072
	f. Tamat SMK	308.764	9	Penduduk Miskin	
	g. Tamat Diploma I/II	25.739		a. Daerah Kota	324.200
	h. Tamat Akademi/ Diploma III	79.429		b. Daerah Desa	292.100
	i. Tamat Sarjana	170.107	10	Rata-rata kebutuhan hidup minimum (Rp.)	700.000

Sumber: Profil Pendidikan DIY Tahun 2011/2012, Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan data demografi di atas, dapat dicermati bahwa urutan terbanyak penduduk DIY usia sekolah adalah penduduk usia 7 – 12 tahun diikuti dengan penduduk usia 16 – 18 tahun, dan penduduk usia 13 – 15 tahun. Sedangkan bila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk DIY merupakan tamatan Sekolah Menengah (SMA/SMK) diikuti dengan tamatan SMP, dan tamatan SD. Kondisi lain menunjukkan bahwa jumlah penduduk lulusan SMK lebih besar

daripada lulusan SMA. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan SMK lebih banyak daripada SMA.

Dilihat dari kemampuan membaca/menulis menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (98,18%) dapat membaca, dan sebesar 1,82% penduduk buta huruf. Sebagian besar angkatan kerja telah bekerja (95,43%) dan sisanya (4,57%) pencari pekerjaan. Data lain menunjukkan bahwa penduduk miskin sedikit lebih banyak di kota dari pada di desa.

Keadaan ekonomi DIY dapat dilihat dari indikator pendapatan asli daerah, pendapatan per kapita, maupun mata pencaharian penduduk. Data pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah DIY sebesar Rp. 420.568.426 juta rupiah, penerimaan pajak sebesar Rp. 440.061.330 juta, dan pendapatan per kapita sebesar Rp. 5.325.762. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pada sektor pertanian, diikuti jasa, dan perdagangan.

Kondisi pendidikan di DIY dapat ditinjau dari tiga indikator utama yang meliputi kinerja dalam aspek pemerataan dan perluasan pendidikan, kinerja peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta kinerja efisiensi pendidikan. Secara rinci gambaran kondisi pendidikan di DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi Pemerataan dan Perluasan Pendidikan.

Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan/akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tidak membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, ras, agama, dan lokasi geografis. Capaian pemerataan pendidikan dapat dilihat dari dua indikator utama berupa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, serta indikator tambahan lainnya. Kondisi pemerataan pendidikan di DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Pemerataan Pendidikan DIY Tahun 2011/2012

No	Kondisi Pemerataan Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	SM (SMA, MA, SMK)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	111,43	115,50	88,79
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	97,53	81,08	63,45
3	Angka Melanjutkan	114,92	104,75	104,38
4	Rasio siswa/sekolah	153	288,96	343,47
5	Rasio siswa/kelas	18	28,02	28,33
6	Rasio siswa/guru	14	20	19,10
7	Rasio kelas/ruang kelas	1,19	0,61	1,06

Sumber: Profil Pendidikan DIY Tahun 2011/2012, Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan data pada Tabel 2. dapat dikemukakan bahwa kondisi pemerataan pendidikan di DIY menunjukkan hal yang menggembirakan. Banyaknya sekolah, kelas, dan guru yang tersedia masih perlu ditingkatkan, banyaknya guru dibanding

dengan kelas sudah mencapai angka nilai ideal, ruang kelas yang tersedia dibanding dengan kelas telah memenuhi standar ideal, kecuali pada SMP/MTs,

Tabel 3. Jumlah Penduduk yang Terlayani PAUD Tahun 2009

No	Kab /Kota	Jumlah Anak Usia 0-6 Th	Jumlah Peserta Didik PAUD					Belum terlayani	Terlayani (%)
			TK/ RA	TPA	KB	SPS	Total		
1	Kulon Progo	39919	7735	213	5650	12926	26.524	13.395	66,44
2	Bantul	57954	23130	384	8295	9225	41.034	16.920	70,80
3	Gunung kidul	49482	13323	184	11233	5460	30.200	19.282	61,03
4	Sleman	78411	25256	1696	4237	16335	47.524	30.887	60,61
5	Yogyakarta	28094	11694	847	1398	21098	35.037	0	124,71
	DIY		81.138	3.324	30.813	65.044	180.319	80.484	71,03

Tabel 4. APK Pendidikan Anak Usia Dini (2006 – 2009)
Menurut Program Layanan

No	Indikator	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Anak usia 0-6 th	305.032	294.477	265.230	253.860
2	Yang terlayani PAUD	37,14	39,01	55,04	71,03
	a. TK/BA/RA	24,74	23,76	30,66	31,96
	b. Kelompok Bermain	4,15	3,84	6,70	12,14
	c. Taman Penitipan Anak	2,43	0,55	0,95	1,31
	d. Satuan PAUD Sejenis	5,83	10,86	16,73	25,62
3	Belum terlayani	62,86	60,99	44,96	31,7

Tabel 5. Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2009

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Lembaga PAUD			
			TPA	KB	SPS	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kulon Progo	12	13	197	239	449
2.	Bantul	17	36	358	254	648
3.	Gunungkidul	18	12	316	202	530
4.	Sleman	17	87	185	323	595
5.	Yogyakarta	14	39	61	568	668
Jumlah Provinsi		78	187	1117	1586	2890

Berdasarkan data pada Tabel 3, 4, dan 5 dapat dicermati bahwa angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 71,03%. Angka tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan layanan PAUD sebagai salahsatu prioritas program pembangunan pendidikan di DIY. Hal ini terbukti dengan diraihnya *PAUD Award* pada Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa DIY merupakan satu-satunya daerah yang yang mampu mewujudkan satu desa minimal

ada satu lembaga PAUD. Sedangkan dilihat dari jumlah lembaga, Satuan PAUD sejenis memiliki jumlah terbesar diikuti KB dan TPA.

Tabel 6. Jumlah Warga Belajar Paket A, B, dan C Tahun 2010

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga		
		Paket A	Paket B	Paket C
1	Kulon Progo	111	1934	891
2	Bantul	209	1511	923
3	Gunungkidul	251	1470	1530
4	Sleman	221	2618	1078
5	Yogyakarta	93	223	891
	DIY	876	7756	4914

Tabel 7. Jumlah Lembaga Penyelenggara Paket A, B, dan C Tahun 2010

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga		
		Paket A	Paket B	Paket C
1	Kulon Progo	5	51	19
2	Bantul	11	23	19
3	Gunungkidul	8	78	40
4	Sleman	9	58	34
5	Yogyakarta	6	11	16
	DIY	39	221	128

Berdasarkan data pada Tabel 6 dan 7 terlihat bahwa di semua kabupaten/kota tersedia layanan Program Paket A, B, dan C. Untuk program Paket A peserta terbesar berasal dari Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, untuk Paket B terbesar dari Kabupaten Kulon Progo dan Sleman, sedangkan untuk Paket C terbesar dari Kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Banyaknya peserta tersebut sebanding dengan jumlah lembaga penyelenggara Paket A, B, dan C.

Tabel 8. Jumlah Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2010

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Program				
		KWD	KWK	KPP	Kerjasama SMK dan Politeknik	Kepemudaan
1	Kulon Progo	3	0	0	0	0
2	Bantul	10	2	2	1	1
3	Gunungkidul	7	0	2	0	2
4	Sleman	16	2	2	0	0

5	Yogyakarta	3	38	10	1	10
	DIY	39	42	16	2	13

Tabel 9. Jumlah Pengangguran yang Terlayani Program Kecakapan Hidup

Tahun	Jumlah Penganggur	Jml Peserta PKH Terlayani	Persen (%)
2005	93.507	4.485	4,8
2006	117.024	3.603	3,08
2007	118.877	4.154	3,49
2008	119.795	11.225	9,37
2009	125.246	12.474	9,96

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DIY

2. Kondisi Mutu dan Relevansi Pendidikan

Kondisi mutu dan relevansi pendidikan di DIY dapat dilihat di Tabel 10.

Tabel 10. Kondisi Mutu Pendidikan DIY Tahun 2011/2012

No	Kondisi Peningkatan Mutu	SD/MI	SMP/MTs	SM (SMA, MA, SMK)
1	Persentase siswa baru SD/MI dari TK/RA	97,60		
2	Angka Mengulang	3,87	0,18	0,22
3	Angka Putus sekolah	0,07	0,09	0,57
4	Angka Kelulusan	98,53	98,28	99,61
5	Kualifikasi pendidikan guru			
	a. Di bawah S1	45,64	16,52	9,10
	b. S1 ke atas	54,21	83,31	90,90
6	Kondisi ruang kelas			
	a. Baik	79,22	86,92	94,82
	b. Rusak ringan	15,17	8,42	4,21
	c. Rusak berat	5,61	4,66	0,97
7	Fasilitas sekolah			
	a. Memiliki perpustakaan	71,15	77,11	80,79
	b. Memiliki lapangan olahraga	72,48	11,85	13,79
	c. Memiliki ruangan UKS	73,33	100	100
	d. Memiliki ruang praktek (SMK)			100

Sumber :
 Profil Pendidikan Provinsi DIY Tahun 2011/2012, Dinas Dikpora DIY

Tabel 11. Kondisi Relevansi Pendidikan DIY Tahun 2011/2012

No	Kondisi Relevansi Pendidikan	Persentase
1	Siswa SMA, MA menurut jurusan	
	a. Jurusan Bahasa	4,24
	b. Jurusan IPS	47,78
	c. Jurusan IPA	47,99
2	SMK menurut kelompok jurusan	
	a. Pertanian dan kehutanan	3,16
	b. Teknologi dan industri	35,09

	c. Bisnis dan manajemen	25,26
	d. Kesejahteraan masyarakat	2,46
	e. Pariwisata	3,13
	f. Seni dan kerajinan	14,39
	g. Kelautan dan perikanan	1,25

Sumber : Profil Pendidikan Provinsi DIY Tahun 2011/2012, Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan data kinerja mutu pendidikan, secara umum dapat dicermati bahwa meskipun belum mencapai kriteria ideal namun sudah mencapai tingkatan yang menggembirakan atau tinggi. Penerimaan siswa baru SD/MI dari TK/RA termasuk kategori tinggi, siswa yang mengulang sangat rendah kecuali untuk SD/MI, siswa yang putus sekolah sangat rendah, siswa yang lulus sangat tinggi, kualifikasi guru di atas S1 tinggi kecuali di SD/MI, kondisi ruang kelas pada umumnya baik, fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium maupun ruang praktek memadai, sedangkan ketersediaan fasilitas olahraga termasuk kurang.

Berdasarkan data relevansi pendidikan dapat dicermati bahwa sebagian besar siswa SMA memilih jurusan IPA dan IPS secara berimbang, sedangkan untuk siswa SMK dominan memilih jurusan teknologi dan industri diikuti dengan jurusan bisnis dan manajemen.

Kondisi pencapaian mutu pendidikan non formal dapat dicermati dari berbagai kondisi menyangkut program pendidikan nonformal seperti layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, kursus, pelatihan kecakapan hidup, peningkatan budaya membaca, dan taman bacaan masyarakat, serta pengarusutamaan gender dapat dicermati dari berbagai data berikut:

a. Tempat Penitipan Anak (TPA)

- 1) Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pengelola TPA (50%) berpendidikan S1, 25% berpendidikan SMA/SMK sederajat, 15% berpendidikan diploma, 7% berpendidikan S2/S3, dan 5% berpendidikan SD/SMP.
- 2) Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pendidik TPA (50%) berpendidikan SMA/SMK sederajat; 29% berpendidikan S1; 17% berpendidikan diploma; 4% berpendidikan SMP; dan 1% berpendidikan S2/S3. Sedangkan dilihat dari kewenangan mengajar, sebagian besar pendidik (70%) berlatar belakang bukan pendidikan, dan 30% berlatar belakang pendidikan. Bila dilihat dari keikutsertaan dalam pelatihan pendidik, sebagian besar (65%) telah mengikuti pelatihan pendidik.

b. Kelompok Bermain (KB)

- 1) Sebagian besar pengelola KB (68,4%) adalah perempuan. Dilihat dari pendidikannya, sebagian besar pengelola KB(40%) berpendidikan SMA/SMK sederajat.
- 2) Sebagian besar pendidik KB (96,25) adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pendidik KB(59,29%) berpendidikan SMA/SMK/ sederajat.
- 3) Sebagian besar pendidik KB(64,55%) berlatar belakang non kependidikan.
- 4) Sebagian besar pendidik (66,9%) telah mengikuti pelatihan pendidik.

c. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

- 1) Sebagian besar pengelola SPS (86,17%) perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar pengelola SPS (50,3%) berpendidikan SMA/SMK/ Sederajat, berpendidikan S1 (21,4%), Diploma (11,2%), S1/S2 (0,8%), dan sisanya berpendidikan SD/ sederajat atau SMP/ sederajat.
- 2) Sebagian besar pengelola SPS (69,32%) belum mengikuti pelatihan manajemen pengelola.
- 3) Sebagian besar pendidik SPS (98,2%) adalah perempuan. Sebagian besar pendidik SPS (58,6%) berpendidikan SMA/SMK/ Sederajat, berpendidikan S1 (18,97%).
- 4) Sebagian besar pendidik SPS (53,78%) telah mengikuti pelatihan pendidik.

d. Program Paket A

- 1) Sebagian besar tutor Paket A (51,68%) adalah perempuan.
- 2) Sebagian besar tutor Paket A (35,32%) berpendidikan S1; 34,78% berpendidikan SMA/ Sederajat; 28,23% berpendidikan diploma; 1,08 berpendidikan SMP/ Sederajat; 0,54% berpendidikan S2/ S3. Sebagian besar tutor (60%) merupakan pendidik dan 40% non pendidik.
- 3) Sebagian besar tutor Paket A (52,59%) telah mengikuti pelatihan pendidikan.
- 4) Dilihat dari tingkat kelulusan, pada ujian nasional tahap I terdapat 68,37% peserta lulus, sedangkan pada tahap II terdapat 81,81 peserta lulus

e. Program Paket B

- 1) Sebagian besar tutor Paket B (57,35%) adalah laki-laki.
- 2) Sebagian besar tutor Paket B (60,74%) berpendidikan S1; 28,13% berpendidikan diploma; 9,69% berpendidikan SMA/SMK/Sederajat; 2,29% berpendidikan S2/S3; dan 0,25% berpendidikan SMP/Sederajat.
- 3) Sebagian besar pengelola Paket B (63,75) adalah laki-laki.
- 4) Sebagian besar pengelola Paket B (45,63%) berpendidikan S1; 26,28% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 17,44% berpendidikan diploma; 5,48% berpendidikan S2/S3; dan 5,15% berpendidikan SMP/Sederajat.
- 5) Hasil Ujian Nasional Tahap I Paket B menunjukkan tingkat kelulusan 62,82%. Sedangkan tingkat kelulusan Ujian Nasional Tahap II adalah 56,08%

f. Program Paket C

- 1) Sebagian besar tutor Paket C (57,21%) adalah laki-laki. Dilihat dari pekerjaan utama, sebagian besar tutor Paket C (84%) adalah pendidik. Sedangkan bila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar tutor Paket C (85,7%) berpendidikan S1; 11% berpendidikan diploma; 2,4% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; dan 0,8% berpendidikan S2/S3.
- 2) Pengelola Paket C sebagian besar (75,4%) adalah laki-laki.
- 3) Sebagian besar pegelola Paket C (63%) berpendidikan S1; 19,4% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 16,5% berpendidikan diploma; 0,1% masing-masing berpendidikan SMP/ sederajat dan S2/S3.
- 4) Tingkat kelulusan Ujian Nasional Tahap I Paket C adalah 58%, sedangkan tingkat kelulusan Ujian Nasional Tahap II adalah 79%.

g. Pendidikan Keaksaraan

- 1) Sebagian besar pengelola pendidikan keaksaraan (51,24%) adalah laki-laki. Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar pengelola (48,5%) berpendidikan SMA/ sederajat; 28,4% berpendidikan S1; 16,8% berpendidikan Diploma; 3,8% berpendidikan SMP/ sederajat; dan 2,07% berpendidikan S2/S2.
- 2) Sebagian besar tutor keaksaraan (61,23%) adalah perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar tutor keaksaraan (56,1%) berpendidikan SMA/SMK/ Sederajat; 20,9% berpendidikan S1; 18,6% berpendidikan diploma; 0,8% berpendidikan S2; dan sisanya berpendidikan SD dan SMP/ sederajat. Dilihat dari pekerjaan utama, sebagian besar

tutor keaksaraan (54,7%) memiliki pekerjaan utama bukan pendidik.

- 3) Hasil ujian Nasional Keaksaraan menunjukkan bahwa 97,3% warga belajar berhasil mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)

h. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKB)

- 1) Pengelola PKBM sebagian besar (41,4%) berpendidikan S1; 32,7% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 20% berpendidikan diploma; 4,3% berpendidikan SMP/ sederajat; dan 1,6 berpendidikan S2/S3.
- 2) Berdasarkan jumlah pendidik, jumlah pendidik laki-laki dan perempuan relatif berimbang.
- 3) Sebagian besar pendidik PKBM (43,44%) berpendidikan S1; 32,86% berpendidikan SMA/SMK/ Sederajat; 21,18% berpendidikan diploma; 1,7% berpendidikan SMP/ sederajat; dan 0,75% berpendidikan S2/S3

i. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pengelola TBM sebagian besar (49,65%) berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 29,08% berpendidikan S1; 13,92% berpendidikan diploma; 5,7% berpendidikan SMP/ sederajat; dan 1,65% berpendidikan S2/S3

j. Lembaga Kursus

- 1) Berdasarkan kurikulum yang digunakan, sebesar 49,80% lembaga kursus menggunakan kurikulum lokal; 46,64% menggunakan kurikulum nasional; dan 3,56% menggunakan kurikulum internasional
- 2) Pendidik kursus sebagian besar (62,32%) berpendidikan S1; 15,01% berpendidikan diploma; 12,83% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 7,26% berpendidikan S2/S3; dan 2,57% berpendidikan SMP/ sederajat
- 3) Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar peserta kursus (30,12%) berpendidikan SD/ sederajat; 14,98% berpendidikan SMP/ sederajat; 25% berpendidikan SMA/SMK/ sederajat; 6,52% berpendidikan diploma; 22,66% berpendidikan S1; dan 0,73% berpendidikan S2/S3
- 4) Dilihat dari lulusannya, sebagian besar (97,68%) lulus ujian lokal; 2,12% lulus ujian nasional; dan 0,20% lulus ujian internasional.

3. Kondisi Manajemen Internal

Kondisi manajemen internal pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator: jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus

sekolah, jumlah mengulang, rata-rata lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masuk per lulusan, rasio keluaran per masukan, angka bertahan, dan koefisien efisiensi. Kondisi manajemen internal pendidikan Provinsi DIY dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 12. Kondisi Manajemen Internal Pendidikan Provinsi DIY Tahun 2011/2012

No	Kondisi Manajemen Internal	SD/MI	SMP/MTs	SM	Kriteria Ideal		
					SD/MI	SMP/MTs	SM
1	Jumlah keluaran	993	995	978	1000	1000	1000
2	Jumlah tahun siswa	6.222	3.005	2.977	6000	3000	3000
3	Jumlah putus sekolah	4	5	22	0	0	0
4	Jumlah mengulang	236	10	8	0	0	0
5	Rata-rata lama belajar						
	a. Lulusan	6,23	3,01	3,01	6	3	3
	b. Putus sekolah	3,96	2,12	1,59	6	3	3
	c. Kohort	6,20	3,01	2,98	8	5	5
6	Tahun siswa mengulang						
	a. Mengulang	673	17	16	0	0	0
	b. Putus sekolah	16	11	35	0	0	0
	c. Jumlah	690	28	50	0	0	0
7	Tahun masukan per lulusan	6,26	3,02	3,04	6	3	3
8	Rasio keluaran masukan	0,96	0,99	0,99	1	1	1

Berdasarkan kondisi manajemen internal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada umumnya jumlah keluaran siswa yang berhasil lulus termasuk kategori tinggi, artinya sudah mendekati standar ideal. Jumlah tahun-siswa sangat baik artinya siswa yang bertahan tetap sekolah hingga berhasil lulus telah melebihi standar ideal. Siswa putus sekolah sangat kecil. Siswa yang mengulang sangat kecil kecuali di SD/MI. Rata-rata lama belajar (termasuk lulusan, putus sekolah, dan kohort) sesuai dengan kriteria ideal. Tahun siswa terbuang sangat kecil, artinya siswa yang mengulang tidak banyak bila dibandingkan dengan standar ideal. Tahun masukan per lulusan sangat sesuai hampir sama dengan standar ideal, dan rasio keluaran-masukan terhadap siswa yang lulus sudah baik (mendekati kriteria ideal).

Kondisi manajemen internal pendidikan non formal dapat dicermati dari data-data berikut:

- a. Tempat Penitipan Anak (TPA)
 - 1) Dari sejumlah 187 lembaga TPA sebagian besar (51%) didirikan oleh PKBM, 21% oleh perorangan, 17% oleh yayasan/ormas/LSM, 9% oleh lembaga lain, dan 2% oleh lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan peran dominan masyarakat/swasta dalam pendirian TPA.
 - 2) Dilihat dari status perijinannya sebagian besar TPA (67%) telah memiliki ijin

- 3) Dilihat dari status pendanaan TPA, sebagian besar bersumber dari orang tua (84%), diikuti dengan donatur perorangan (9%), yayasan (3%), anggaran pemerintah (1%)
- 4) Berdasarkan status kepemilikan bangunan, sebagian besar bangunan TPA (51%) berstatus sewa dan 49% berstatus milik sendiri

b. Kelompok Bermain (KB)

- 1) Berdasarkan lembaga penyelenggara, sebagian besar penyelenggaraan Kelompok Bermain (40,03%) adalah yayasan/ormas/LSM; 26,02% oleh lembaga lain; 24,62% oleh PKBM; 8,06% oleh perorangan, dan 1,07% oleh lembaga pemerintah.
- 2) Sebagian besar Kelompok Bermain (80,84%) telah memiliki ijin
- 3) Dilihat dari sumber pendanaan utama, sebagian besar (66,8%) Kelompok Bermain menyatakan berasal dari orangtua
- 4) Berdasarkan status kepemilikan bangunan, sebagian besar Kelompok Bermain (68,3%) memiliki bangunan berstatus sewa

c. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

- 1) Sebagian besar penyelenggara PAUD sejenis (60,8%) adalah yayasan/ormas/LSM
- 2) Sebagian besar Satuan PAUD Sejenis (53,4%) belum memiliki ijin
- 3) Menurut sumber pendanaan utama, sebagian besar PAUD Sejenis (31,1%) pendanaan utama bersumber dari orangtua, pendanaan dari APBD (18,9%), pendanaan lainnya (20,4%), perorangan (14,6%), ormas/LSM (9,3%), APBN (2,5%), dan yayasan (2,5%)
- 4) Sebagian besar kepemilikan bangunan Satuan PAUD Sejenis (92,4%) berstatus sewa

d. Program Paket A

- 1) Penyelenggara Program Paket A sebagian besar (84,61%) adalah PKBM, yang lainnya dikelola oleh perorangan, yayasan/ormas/LSM, SKB dan lainnya.
- 2) Sebagian besar lembaga penyelenggara program Paket A (94,87%) belum terakreditasi
- 3) Berdasarkan pendanaan utama, sebanyak 48,71% Program Paket A bersumber dari PKBM, 28,2% bersumber dari perorangan, dan 23,07% bersumber dari yayasan/ormas/LSM

e. ProgramPaket B

- 1) Berdasarkan lembaga penyelenggara, sebagian besar Program Paket B (88,05%) diselenggarakan oleh PKBM. Sebagian besar lembaga (87,55%) belum terakreditasi.

- 2) Berdasarkan sumber pendanaan, sebesar 70,13% Program Paket B dibiayai dengan sumber utama perorangan; 25,79% PKBM; dan 4,07% yayasan/ormas/LSM.
- f. Program Paket C
- 1) Lembaga penyelenggara Paket C sebagian besar (90,62%) adalah PKBM. Sebagian besar (89,8%) lembaga penyelenggara Paket C belum terakreditasi.
 - 2) Dilihat dari sumber pendanaannya, sebesar 53% lembaga penyelenggara Paket C memiliki sumber utama dari PKBM; 25% lembaga berasal dari perorangan; 21% dari yayasan/ormas/LSM; dan 0,1% lembaga bersumber dari pemerintah.
- g. Pendidikan Keaksaraan
- 1) Penyelenggara pendidikan keaksaraan sebagian besar (76,4%) adalah PKBM; diikuti dengan SKB/PKBM sebesar 14,2%; yayasan/oras/LSM sebesar 7,8%; dan perorangan 0,3%
 - 2) Berdasarkan sumber pendanaan utama, sebesar 77,3% Pendidikan Keaksaraan bersumber dari perorangan; 22,1% lembaga bersumber dari perorangan; dan 22,1% lembaga bersumber dari SKB/BPKB
- h. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- 1) Berdasarkan status perijinan, sebagian besar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (94,5%) telah memiliki ijin, namun demikian dilihat dari status akreditasi masih terdapat 97% lembaga yang belum terakreditasi.
 - 2) Berdasarkan sumbernya, sebagian besar PKBM (96%) sumber pendanaan utama berasal dari pemerintah.
- i. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- 1) Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menurut penyelenggara menunjukkan bahwa sebagian besar TBM (36%) diselenggarakan oleh PKBM; lembaga lain (31%); yayasan/ormas/LSM (24,3%); perorangan (7,1%); dan UPTD SKB/BPKB (1,4%).
 - 2) Dilihat dari sumber pendanaan, sebagian besar TBM (43,6%) bersumber dari dana APBD; 31,4% dari swadana; 9,3% dari APBN; dan 2,1% melalui pendanaan mandiri/iuran
- j. Lembaga Kursus
- 1) Berdasarkan status penyelenggara, sebagian besar lembaga kursus (87,10%) telah berbadan hukum. Namun berdasarkan status akreditasi, sebagian besar (72,06%) lembaga kursus belum terakreditasi

- 2) Berdasarkan sumber pendanaan, sebagian besar lembaga kursus (88,10%) menggunakan sumber pendanaan utama dari iuran peserta
- 3) Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar peserta kursus (57,88%) adalah mahasiswa/siswa, peserta didik yang statusnya bekerja sebanyak 23,84%, dan peserta didik yang statusnya tidak/belum bekerja sebesar 18,27%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kursus diminati oleh semua kalangan baik yang bekerja maupun yang belumbekerja atau mahasiswa/siswa.

B. ANALISIS KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

a. Modal kultural dan modal sosial yang kuat di masyarakat DIY

DIY kaya dengan modal kultural berupa nilai-nilai luhur (*values*) yang diaktualisasikan ke dalam adat-kebiasaan dan berbagai karya budaya. Nilai luhur tersebut berakar pada kebudayaan Jawa yang telah berinteraksi dan berakulturasi dengan kebudayaan berbagai suku bangsa di nusantara dan kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Akulturasi yang terjadi tetap berhasil memelihara keharmonisan dan tidak kehilangan jatidirinya. Ungkapan *hamemayu hayuning bawana* merupakan contoh suatu nilai dasar yang menjadi acuan dalam berinteraksi dengan berbagai tata nilai dari luar, apabila potensial positif dapat melestarikan dan menumbuhkan kedamaian dan kemajuan akan disambut baik, akan tetapi kalau potensial dapat merusak dan mengganggu kedamaian akan ditolak. Masih segar dalam ingatan publik pada waktu reformasi ditandai dengan pembakaran dan perusakan, di DIY reformasi terjadi dengan damai.

Modal sosial berupa berbagai jaringan sosial, baik formal maupun informal, menjadikan DIY nyaman untuk siapapun, asal keberadaannya dengan niat yang baik. Kota Yogyakarta berhati nyaman, Bantul Projotamansari, Sleman Sembada, Kulon Progo Binangun, dan Gunung Kidul Handayani begitulah semboyan yang menjiwai kehidupan di wilayah ini. Dalam bidang pemerintahan, Pemerintah DIY mencanangkan budaya kerja yang disebut *Satriya* yang bermakna : Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin & percaya diri, dan Ahli profesional. Budaya pemerintahan *Satriya* yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY

No. 72 Tahun 2008 adalah bentuk komitmen Pemerintah DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yaitu ajaran moral *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*, serta dengan semangat *golong gilig*.

Sektor informal hidup subur bermodalkan kepercayaan. Banyak transaksi ekonomi berdasarkan kepercayaan, tanpa administrasi rumit dan sistem agunan sebagaimana sektor formal. Banyak pemondokan disediakan oleh masyarakat untuk mengakomodasi pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air maupun manca negara juga dikelola secara kekeluargaan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa jejaring kerjasama formal tidak ada. Untuk urusan-urusan tertentu di sektor formal tentu saja secara formal dipersyaratkan. Sektor formal hidup berdampingan secara damai yang dulu dikenali dengan sistem dualistik, hingga sekarang masih ditemukan di wilayah DIY.

b. DIY memiliki banyak keunggulan komparatif

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di DIY sudah mencapai tuntas paripurna, bahkan di atas indikator agregatif nasional (lihat Tabel 2), di antaranya karena secara historis berpengalaman pula semenjak rintisan wajib belajar 6 tahun. Oleh karenanya sudah saatnya dicanangkan wajib belajar atau pendidikan menengah universal 12 tahun.

DIY memiliki andil besar dalam sejarah perkembangan pendidikan nasional dan internasional yang dibuktikan dengan adanya lima sistem pendidikan yang disebut Pilar Keistimewaan Pendidikan DIY, yaitu : Konsep dan Pola Pendidikan Kraton dan Paku Alaman, Muhammadiyah, Taman Siswa, Pondok Pesantren yang memiliki nilai historis seperti Krapyak dan Mlangi, dan Persekolahan Model Barat. Hal ini berarti di DIY sudah ada modal kultural yang dengan kuatnya melahirkan pemikiran pembaharuan, termasuk pembaharuan masyarakat melalui pendidikan.

Dewasa ini banyak perguruan tinggi terkemuka yang ada di DIY (UGM, UNY, ISI, UIN, UII, USD, UMY, UAD, UPN, UAJY, dsb.), hal ini berarti banyak modal intelektual dan fasilitas pendidikan dengan reputasi nasional dan bahkan internasional dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian. Di samping itu masih terdapat lebih dari 115

Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Kopertis dan Kopertais. Kerjasama internasional telah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Keberadaan modal intelektual ini sudah barang tentu menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya untuk membangun pendidikan DIY.

Sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, DIY menjadi tujuan putra-putri dari seluruh penjuru tanah air untuk belajar; sehingga terjadilah kehidupan masyarakat majemuk (multi kultur, etnis/ras, agama, sosial-ekonomi, orientasi politik) yang damai. Kemajemukan ini diperkaya lagi dengan banyaknya orang asing yang datang ke DIY dengan kepentingan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan kebudayaan. Iklim masyarakat yang majemuk tersebut terbukti sangat kondusif untuk pendidikan; memperkaya pengalaman sosial dan kultural baik bagi pendatang maupun bagi penduduk asli.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini makin mempercepat kemajuan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi, melalui media cetak, media elektronik, serta jejaring dunia maya. Meski tetap harus diwaspadai, pemanfaatan kemajuan dan kemudahan teknologi komunikasi dan informasi, nampaknya secara proporsional masih lebih banyak untuk kepentingan positif. Apabila hal ini dapat diperkuat, berarti modal intelektual bersama dengan modal sosial dan modal kultural yang ada dapat menjadi kekuatan pengendali moral dalam era teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini.

Salah satu keunggulan komparatif di DIY adalah biaya hidup yang relatif murah, namun juga sekaligus tersedia banyak pilihan bagi yang memerlukan, sehingga dapat melayani berbagai kebutuhan, selera, dan kemampuan finansial. Bagi pendatang dengan tujuan pendidikan, kondisi ini bernilai sangat positif.

Keunggulan komparatif lain dapat dicermati dari kondisi capaian kinerja pendidikan baik sektor formal, nonformal maupu informal yang terlihat dari data-data di atas. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun, tingginya APK dan APM terutama pendidikan dasar, tingginya angka melanjutkan, makin meratanya layanan PAUD dibuktikan dengan diraihnya *“PAUD Award”*, dan makin berperannya pendidikan non formal dan

informal merupakan contoh nyata yang menunjukkan potensi pengembangan pendidikan DIY ke depan.

Dalam hal kualitas sumberdaya manusia khususnya pendidik/guru, tingkat pendidikan guru di DIY sebagian besar telah mencapai S1 atau lebih. Salahsatu dampak positif dapat dicermati dari Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi para guru yang akan mengikuti program sertifikasi tahun 2012 menunjukkan bahwa nilai UKA guru di DIY menempati rangking tertinggi secara nasional. Hasil Uji Kompetensi Guru secara online juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi diraih oleh guru-guru DIY. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DIY memiliki daya dukung guru yang berkualitas yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kelayakan guru dalam mengajar (lihat Tabel 3).

2. Kelemahan

Dilihat dari perspektif pembangunan pendidikan, DIY memiliki keterbatasan atau kelemahan sebagai berikut:

a. Statistik pendidikan

Kondisi kependudukan dengan tingkat kepadatan tinggi, dan banyak pengguna pendidikan yang bukan penduduk, sehingga harus hati-hati di dalam membaca dan memaknai statistik pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini masih harus mempertimbangkan pula mobilitas penduduk dan anak sekolah serta mahasiswa lintas kecamatan dan lintas kabupaten/kota. Meskipun statistik menunjukkan tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bahkan di atas 100% (data Tabel 2), apabila dilakukan penyisiran masih mungkin ditemukan anak usia 7 – 12 tahun yang mestinya sekolah akan tetapi tidak bersekolah.

b. Keterbatasan lahan pendidikan

Keterbatasan lahan untuk pendidikan, lebih-lebih di perkotaan berakibat lahan sekolah dan satuan pendidikan lainnya, sering tidak memenuhi syarat bahwa perlu ada tempat bermain, dan atau perlu ada ruang hijau, tidak terlalu penuh dengan bangunan, dan sebagainya. Akibat lebih jauh dimungkinkan siswa sekolah tidak dapat bermain, dan pelajaran olahraga kurang optimal (lihat Tabel 3), semua ini potensial mengganggu perkembangan anak.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi sumberdaya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan pendidikan dapat dicermati dari kualifikasi maupun kompetensi pelaku pendidikan baik perencana, pengelola lembaga, pendidik, pamong, maupun tutor. Secara umum dilihat dari kualifikasi pendidikan maupun pelatihan kondisi sumberdaya manusia di DIY menunjukkan hal yang menggembirakan. Namun demikian tidak dipungkiri masih banyak pula SDM yang belum memenuhi kualifikasi yang seharusnya terutama di pendidikan non formal. Oleh karenanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program tetap harus diprioritaskan seiring dengan tuntutan perubahan ke depan.

Dibandingkan dengan daerah lain, para guru di DIY lebih mudah untuk menjangkau pendidikan tinggi, karena banyaknya Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) sehingga dari aspek kualifikasi formal tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi kinerja mereka yang sudah bersertifikat profesi tidak dijamin bahwa lebih baik dari mereka yang belum bersertifikat. Masalah lain adalah ketenagaan, yakni terbatasnya atau bahkan tidak ada tenaga tatausaha (khususnya SD), sementara itu tuntutan pekerjaan administratif perkantoran sangat tinggi; misalnya pengadministrasian keuangan yang dituntut standar akuntansi tertentu. Hal ini berakibat bahwa pendidik terpaksa berkurang konsentrasinya untuk mengerjakan pekerjaan perkantoran, di samping administrasi pembelajaran.

d. Pendanaan Pendidikan

Terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan keterbatasan kemampuan finansial daerah untuk membiayai pendidikan, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam menentukan prioritas yang memiliki nilai strategis dalam perencanaan anggaran maupun kegiatan. Proporsi anggaran pendidikan yang tercermin dari anggaran Dinas Dikpora yang bersumber dari APBD dalam periode 2008-2011 berkisar 18,56% dari total anggaran (Profil Pendidikan Provinsi DIY, 2011).

Tingginya peran serta masyarakat, yayasan/ormas/LSM dalam berbagai program pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal seperti yang terlihat dari data-data analisis situasi di atas merupakan hal yang membanggakan. Namun demikian hal tersebut tidaklah menggugurkan peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah DIY. Oleh karenanya upaya

peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi prioritas yang penting.

C. ANALISIS KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

Posisi strategis DIY dalam pembangunan regional dan nasional yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan pendidikan mencakup kondisi geografis, perekonomian, dan sosial budaya; sebagaimana tertuang di dalam RPJMD 2009-2013, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Perpres 26 tahun 2008) DIY menjadi Pusat Kegiatan Nasional yang akan berperan sebagai pintu gerbang internasional, artinya berada pada posisi strategis di Jawa yakni poros utara selatan dan bagian selatan Jawa Tengah (Joglosemar, Gelangmanten, Pawonsari, Subosuko dan Barlingascape) (RPJMD: 88-89);
- b. Keberadaan kraton sebagai pusat budaya yang masih sangat kuat posisinya di kehidupan sosial budaya masyarakat memberi peluang DIY untuk ditata menjadi pusat budaya dan kawasan berbudaya terkemuka yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman (RPJMD: 78-79). Terkait dengan hal ini adalah masih kuatnya modal kultural gotong-royong yang dapat menjadi modal dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen (2008) meski variatif antar sektor, namun relatif stabil dengan proporsi PDRB terbesar dari sektor tersier yakni perdagangan, hotel, restorasi, dan jasa lainnya; serta dari sektor primer yakni pertanian, dan penggalian (RPJMD: 10)
- d. DIY sebagai daerah tujuan wisata nasional dan dunia, di antaranya pertumbuhan kunjungan wisatawan 2009-2013 sebesar 10 persen per tahun (RPJMD: 72-73). Hal ini tentu memiliki konsekuensi luas pada pertumbuhan sektor jasa perhotelan, transportasi, kuliner, industri kerajinan. Perkembangan dewasa ini sudah dibuktikan banyaknya hotel baru, pusat kuliner, serta usaha persewaan kendaraan.

2. Ancaman

Ancaman dari lingkungan eksternal lebih banyak datang dari lingkungan alam dan aspek ketertiban dan keamanan.

- a. Bencana alam

DIY dengan Gunung Merapi yang sangat tipikal, dan sungai-sungainya memang menghasilkan lahan yang subur untuk pertanian, dan mewujudkan lanskap yang indah. Namun harus diwaspadai bahwa gunung berapi super aktif dan sungai-sungainya merupakan sumber bencana gempa dan banjir. Di samping itu keberadaan patahan Opak dan subduksi lempeng bumi di lautan Indonesia juga merupakan sumber bencana yang tak kalah dahsyatnya. Gempa Mei tahun 2006 mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan sangat besar termasuk prasarana pendidikan; kemudian erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010 hingga kini juga masih menyisakan bahaya lahar dingin.

Paling tidak terdapat tujuh kawasan rawan bencana di DIY, antara lain: (a) kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman; (b) kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul; (c) kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo; (d) kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo; (e) kawasan rawan angin topan di seluruh kabupaten/kota; (f) kawasan rawan gempa bumi di seluruh kabupaten/kota; (g) kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam konteks ini pendidikan kebencanaan dan upaya mitigasi bencana menjadi kebutuhan nyata.

b. Gangguan ketertiban dan keamanan

Ancaman sosial ini tidak dapat diabaikan, gangguan ketertiban dan keamanan sangat banyak modusnya, sangat beragam pula pelakunya dan kualitasnya juga semakin meningkat sejalan dengan kemajuan dan kemudahakan dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di berbagai sektor kehidupan. Perbedaan kenakalan dan kriminalitas sangat tipis, banyak usia remaja, pelajar dan mahasiswa terlibat kasus gangguan ketertiban umum. Belum lagi jaringan kriminal yang juga beroperasi di DIY merupakan sumber keresahan yang dapat mengganggu dunia pendidikan. Ketahanan budaya sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan yang demikian pesatnya.

c. Tumbuhnya kota lain sebagai pusat pendidikan

Oleh karena pencapaian pendidikan yang semakin tinggi tidak hanya terjadi di DIY, maka tidak mengherankan bahwa pertumbuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan juga terjadi di mana-mana. Kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana pendidikan juga semakin tersebar sehingga tumbuhlah beberapa kota lain yang dapat dipersepsikan sebagai pesaing kota pendidikan. Dengan Renstra ini diharapkan DIY memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya sebagai pusat pendidikan melalui penguatan keunikan pendidikannya yang berbasis budaya.

d. Meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba, teknologi informasi & komunikasi, pergaulan bebas, HIV dan AIDS

Meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba, teknologi komunikasi, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa merupakan ancaman serius bagi lingkungan pendidikan yang sehat. Demikian pula halnya dengan ancaman penyebaran HIV dan AIDS yang menempatkan DIY berada di urutan ke 9 dari 33 provinsi di Indonesia. Orang terpapar HIV dan AIDS di DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya tidak terlalu tajam. Data dari Dinas Kesehatan DIY pada Desember tahun 2009 menunjukkan prevalensi jumlah orang terpapar HIV DAN AIDS sebanyak 899 orang (orang terpapar HIV: 609 kasus dan AIDS 290 kasus); pada bulan Desember 2010 menunjukkan peningkatan menjadi 1.288 orang (orang terpapar HIV 783 kasus dan AIDS 505). Namun data ini belum menunjukkan prevalensi yang sesungguhnya dikarenakan kasus HIV dan AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu masih adanya orang terpapar HIV dan AIDS yang tidak terlacak.

e. Adanya fenomena yang mengindikasikan menyebarnya berbagai paham yang potensial untuk menumbuhkan pola kehidupan eksklusif baik sebagai individu ataupun kelompok.

Penyebaran berbagai paham eksklusif tersebut terjadi melalui berbagai cara dan media dengan berbagai kelompok sasaran mulai dari lembaga pendidikan formal, nonformal maupun informal. Penyebaran berbagai paham tersebut juga merambah berbagai usia baik jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Fenomena ini perlu

mendapatkan perhatian serius mengingat besarnya dampak negatif yang timbul terutama bagi generasi muda.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Terkait dengan analisis kondisi umum tersebut, terdapat lima isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Penyediaan kesempatan pendidikan berkualitas untuk semua sepanjang hayat dan nondiskriminatif

Sebagai pusat pendidikan, DIY memang harus terbuka, siapapun dapat mengakses kesempatan menempuh pendidikan, namun sekaligus juga harus diupayakan bahwa jangan sampai pendidikan putra-putri masyarakat setempat terabaikan, termasuk mereka yang karena kondisi anak dan atau kondisi orangtuanya yang memerlukan bantuan. Dengan demikian isu yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah pendidikan yang harus nondiskriminatif, namun tetap peduli terhadap warga masyarakat yang kalau tidak ada bantuan afirmatif atau advokatif tidak mungkin memperoleh pendidikan yang layak. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa orientasi egalitarian dan pendidikan prorakyat dituntut pula mampu menyediakan layanan pendidikan yang sangat peduli kualitas, peduli terhadap kebutuhan orientasi karir yang beragam dalam mempersiapkan masa depan anak-anak. Ada sebagian dirasa cukup dulu dengan pendidikan menengah karena perlu segera dapat bekerja, namun sebagian lain membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, dan oleh karenanya memerlukan pendidikan dasar dan menengah yang cukup kuat untuk bekal belajar berbagai disiplin dan keahlian di sektor modern yang sangat ketat persaingannya. Dengan demikian pada dasarnya setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk menempuh pendidikan di setiap jalur, jenjang, maupun jenis pendidikan tanpa diskriminasi baik jenis kelamin, ras, agama, dan lainnya.

2. Pengembangan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kedamaian dalam kemajemukan

Pendidikan yang berkarakter, pendidikan karakter, *nation and character building* adalah tema tema yang menuntut dapat diakomodasikan di dalam pendidikan di DIY secara sistemik kelembagaan. Aset kebudayaan DIY yang tak ternilai harganya perlu dikawal jangan sampai terlibas dalam berinteraksi dengan berbagai kebudayaan lain, perlu pelestarian atas aspek-aspek yang substantif esensial, dan untuk hal-hal yang bersifat teknis

instrumental bila perlu terbuka untuk berakulturasi dengan kebudayaan lain. Dengan demikian isunya adalah bagaimana peran pendidikan dalam pembangunan kebudayaan agar secara arif DIY tidak kehilangan jatidiri budayanya, namun cukup adaptif berakulturasi dengan budaya lain. Refleksi atas pengalaman historis menunjukkan bahwa kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di DIY merupakan salah satu aset unik yang perlu menjadi salah satu parameter di dalam pengembangan pendidikan yang diharapkan mampu berkiprah dan mendapatkan pengakuan di taraf nasional dan internasional.

3. Pengembangan pusat unggulan nasional pengembangan mutu pendidikan yang komprehensif

Perkembangan pendidikan belakangan ini menampilkan hal-hal yang cukup mengawatirkan, misalnya adanya kecenderungan perubahan yang bersifat parsial, reduktif, instan, atau pragmatis. Misalnya ada ungkapan mutu akademik rendah tidak menjadi masalah asal jujur. Ungkapan ini mengawatirkan, karena seolah-olah akademik dan moral itu pilihan, padahal harus keduanya baik. Contoh lain, mestinya hasil belajar itu akumulatif diupayakan sejak awal secara konsisten, tetapi yang terjadi dilakukan pengkarbitan pada saat-saat terakhir menjelang ujian nasional. Pengembangan pendidikan DIY diharapkan mampu menghasilkan model pendidikan bermutu yang utuh, komprehensif, dimana dimensi intelektual-emosional-moral-spiritual dan kecerdasan lain yang esensial menjadi komitmen semua pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan.

4. Pengembangan pendidikan yang relevan dengan pembangunan daerah dan nasional dalam konteks global

Isu keempat ini mengingatkan pentingnya relevansi pendidikan dengan lingkungan terdekat (daerah), nasional, bahkan perlu pula memperhitungkan lingkungan kawasan Asean dan global. Pembangunan senantiasa mengandung aspek-aspek ekonomi – sosial – politik. Pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan ekonomi – sosial-politik tersebut. Contoh sederhana pendidikan kecakapan hidup, haruslah menggali sumberdaya setempat (lokal/daerah/nasional) yang diantisipasi cocok dengan perkembangan masyarakat nasional dan internasional. Modal budaya dan modal sosial perlu diberdayakan dan didayagunakan untuk membangun pendidikan; sebaliknya pendidikan juga perlu memiliki andil dalam memperkuat modal

kultural dan modal sosial tersebut, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik.

5. Pengembangan tatakelola pendidikan yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya

Pendidikan yang visioner membutuhkan sistem pendukung yang tepat, yang dibangun dengan cara yang tepat pula. Tatakelola atau *governance* itulah sistem pendukung yang dimaksud; yang tercakup di dalamnya adalah kepemimpinan dan manajemen serta pengorganisasian untuk urusan SDM, pembiayaan, sarana-prasarana, dan program-kegiatan. Di samping tatakelola yang utuh dan tepat tersebut, masih perlu pula dikembangkan pola hubungan kerja sistemik dan sinergis intra dan inter sistem birokrasi pada tingkat satuan pendidikan, tingkat daerah (kabupaten/kota), dan tingkat DIY dalam satu sistem nasional dan dalam kontek global. Sampai kini masih ada hal yang memerlukan pembenahan dalam implementasi sistem desentralisasi pendidikan. Satu hal lagi yang esensial adalah bahwa menggulirkan perubahan menuju kuatnya orientasi kultural dalam pendidikan harus menggunakan pendekatan kultural dikomplementasikan dengan pemakaian pendekatan legal struktural yang tak terhindarkan di dalam sistem birokrasi formal.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JANGKA PANJANG

A. VISI DAN MIISI

Daerah Istimewa Yogyakarta kaya dengan keunggulan komparatif, misalnya sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan modal budaya dan modal sosial serta komitmen segenap komponen daerah untuk mengunggulkan dunia pendidikan. Kekayaan keunggulan komparatif tersebut perlu ditransformasikan sehingga menjadi keunggulan kompetitif dalam bidang pendidikan, dan cita-cita ini dituangkan ke dalam Visi Pembangunan Pendidikan DIY.

Visi Pembangunan Pendidikan DIY

**“DIY MENJADI PUSAT PENDIDIKAN BERBASIS
BUDAYA TERKEMUKA DI ASIA TENGGARA PADA
TAHUN 2025”**

Budaya yang dimaksud dalam visi tersebut adalah nilai-nilai luhur budaya DIY yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya nasional dalam konteks perkembangan budaya global. Dengan visi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah DIY berkomitmen untuk berperan optimal dalam pembangunan peradaban bangsa. Rumusan visi tersebut arahnya untuk menunjang terwujudnya visi Pembangunan Jangka Panjang DIY tahun 2005 – 2025.

Penempatan nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu pertama : nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan ,kedua : nilai luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam pelaksanaan maupun pengelolaan pendidikan, ketiga : nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan pendidikan. Pendidikan berbasis budaya maksudnya adalah pendidikan yang pengelolaan dan penyelenggaraannya mengacu standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pendidikan DIY Tahun 2025 maka dirumuskan Misi Pembangunan Pendidikan DIY yang difokuskan pada cara mengatasi lima isu strategis yang

sudah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Misi Pembangunan Pendidikan DIY tersebut adalah:

- Misi Pertama: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua sepanjang hayat dan nondiskriminatif.
- Misi Kedua: Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya
- Misi Ketiga: Mengembangkan pusat unggulan mutu pendidikan nasional yang komprehensif
- Misi Keempat: Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional dalam konteks global
- Misi Kelima: Mengembangkan tatakelola berbasis budaya di bidang pendidikan

Kelima misi tersebut koheren dengan Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 yang dikemas dalam “Misi 5K” yakni: meningkatkan **Ketersediaan**, memperluas **Keterjangkauan**, meningkatkan **Kualitas** dan relevansi, mewujudkan **Kesetaraan**, dan menjamin **Kepastian** memperoleh layanan pendidikan yang mencakup persoalan aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian keberhasilan misi pembangunan pendidikan DIY yang mengakar pada kondisi daerah dipastikan memiliki andil pada pembangunan pendidikan nasional. Hal ini mencerminkan pemikiran dan tindakan yang kontekstual dengan kondisi lokal/daerah, kepentingan nasional, dan perkembangan global.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan DIY dirumuskan tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY sebagai berikut:

- T1. Mengembangkan pendidikan berkualitas untuk semua sepanjang hayat dan nondiskriminatif.
- T2. Mewujudkan layanan pendidikan menengah universal 12 tahun.
- T3. Mewujudkan masyarakat pembelajar (*learning society*) sepanjang hayat.
- T4. Menyiapkan generasi muda berkarakter yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, dan inovatif, serta profesional

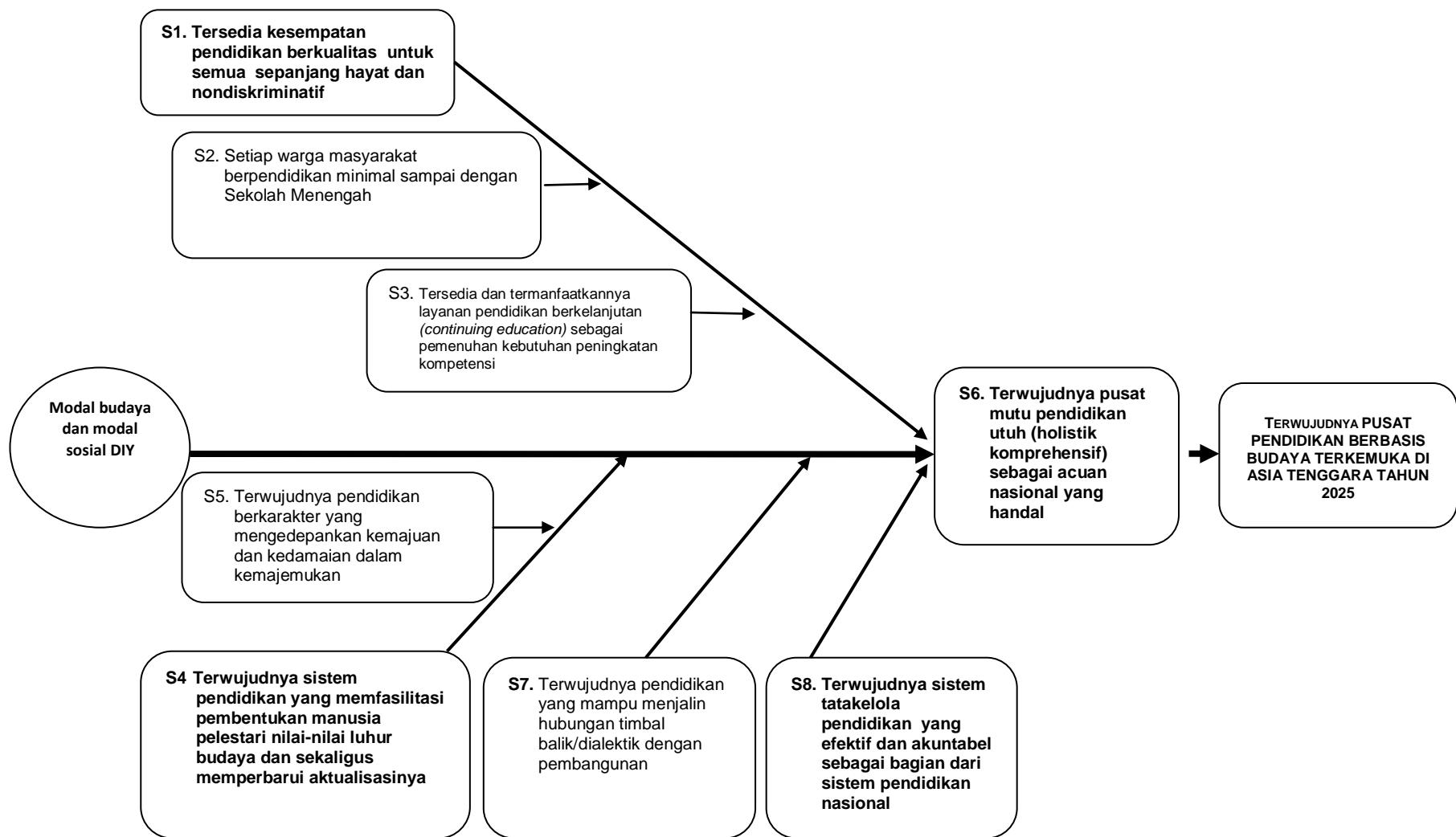
- T5. Menciptakan sinergitas satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi penegakan hukum
- T6. Menjadikan DIY sebagai acuan mutu pendidikan nasional
- T7. Menciptakan inovasi pendidikan secara sistemik dan sinergis
- T8. Meningkatkan tatakelola berbasis budaya di bidang pendidikan

2. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY, dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

- S1. Tersedia kesempatan pendidikan berkualitas untuk semua sepanjang hayat dan nondiskriminatif
- S2. Setiap warga masyarakat berpendidikan minimal sampai dengan Sekolah Menengah
- S3. Tersedia dan termanfaatkannya layanan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) sebagai pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi
- S4. Terwujudnya sistem pendidikan yang memfasilitasi pembentukan manusia pelestari nilai-nilai luhur budaya dan sekaligus memperbarui aktualisasinya
- S5. Terwujudnya pendidikan berkarakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
- S6. Terwujudnya pusat mutu pendidikan yang utuh (*holistik/komprehensif*) sebagai acuan nasional yang handal
- S7. Terwujudnya pendidikan yang mampu menjalin hubungan timbal balik/dialektik dengan pembangunan
- S8. Terwujudnya sistem tatakelola pendidikan yang efektif dan akuntabel sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional

Hubungan antar sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam Gambar 1



Gambar 1. Hubungan antar sasaran strategis

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
JANGKA MENENGAH TAHUN 2014 - 2018

A. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Identifikasi dan formulasi Strategi Pembangunan Pendidikan DIY Tahun 2014-2018 berikut didasarkan pada kondisi internal dan kondisi eksternal untuk mengatasi lima isu strategis dan mewujudkan Visi Pembangunan Pendidikan.

1. Strategi terkait potensi/ kekuatan daerah

- a. Pendayagunaan keunggulan komparatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam pembangunan pendidikan DIY. Sumberdaya pendidikan yang terdapat di DIY termasuk jaringan kerjasama yang luas dilakukan oleh banyak satuan pendidikan merupakan aset daerah. Aset ini harus didayagunakan secara optimal dan sinergis sehingga memberi kontribusi yang nyata bagi pendidikan pembangunan DIY.
- b. Perluasan dan pemerataan akses serta pengembangan pendidikan menengah universal 12 tahun. Heterogenitas masyarakat dan para pengguna jasa pendidikan di DIY perlu mendapatkan layanan yang tidak membedakan (nondiskriminatif) sehingga keragaman justru didayagunakan untuk memperkuat dunia pendidikan. Meskipun demikian adanya kelompok di masyarakat yang karena kekhususan kondisinya tidak tertutup kemungkinan untuk dikenai kebijakan afirmatif dan atau advokatif, misalnya Anak Berkebutuhan Khusus, dan anak dari keluarga miskin. Strategi tersebut juga dipandang tepat untuk mengembangkan pendidikan menengah universal 12 tahun.
- c. Pengembangan pendidikan berlandaskan modal kultural, modal sosial, dan pendidikan karakter integratif dengan peningkatan mutu dan relevansi. Aset kebudayaan tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal, akan tetapi lebih dari itu, kebudayaan juga mewarnai pendidikan secara sistemik integratif. Berbagai bentuk jejaring sosial yang selama ini sangat mendukung pendidikan perlu dilestarikan dan dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan zaman dan

tetap dijaga agar tidak terjadi pengikisan identitas diri budaya (*cultural self identity*).

Penggunaan modal kultural dan modal sosial dalam pengembangan pendidikan dipadukan dengan banyak cara :

- 1) Penguatan kembali pendekatan humanis yang dewasa ini sangat dikhawatirkan mengalami keterpinggiran;
- 2) Penguatan ketahanan budaya untuk menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba dan paham radikal/diskriminatif;
- 3) Penguatan paradigma teknosains yang diyakini akan semakin dominan di abad 21 yang diimbangi dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan secara sinergis sehingga memberi manfaat yang lebih optimal.

d. Penguatan sinergitas tatakelola pendidikan DIY, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Pendidikan formal, nonformal, dan informal dituntut dapat menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan masyarakat, bangsa, dan kawasan, serta perkembangan dunia. Perkembangan tersebut perlu dipahami secara utuh, karena pasti mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks proses-proses demografis, kemajuan ipteks, serta lingkungan alam dan ekosistemnya. Di samping itu dalam skala internal DIY, pendidikan harus cepat tanggap pula terhadap berbagai indikator ketimpangan antar daerah, antar kelompok, meskipun diasumsikan bahwa tidak ada lagi daerah terpencil sebagaimana terjadi di luar Jawa. Yang dihadapi DIY justru munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang berarti tumbuh-kembangnya persoalan dan kebutuhan pendidikan, misalnya: merebaknya ragam wisata (desa wisata, wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan), akan dibangunnya bandara baru yang dipastikan akan memicu perubahan segi-segi kehidupan daerah.

2. Strategi menghadapi keterbatasan dan ancaman

- a. Penguatan manajemen dan penganggaran pendidikan yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Hal ini sangat strategis mengingat bahwa pendidikan DIY tidak lepas dari keterbatasan

pendanaan, sistem informasi, kapabilitas SDM, dan kapasitas kelembagaan. Sudah saatnya diterapkan manajemen berbasis pengetahuan dalam dunia pendidikan.

- b. Pengembangan pendidikan kebumian dan kebencanaan. Hal ini diyakini telah menjadi keniscayaan karena kondisi kebumian DIY yang bukan hanya merupakan sumber belajar yang tiada terhingga, akan tetapi juga merupakan sumber bencana yang tidak selalu dapat diduga terjadinya.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014 - 2018 berikut dirumuskan dengan tetap menjaga kesinambungannya dengan kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu sebelumnya.

1. Peningkatan Aksesibilitas Kesempatan Pendidikan Berkualitas untuk Semua Sepanjang Hayat dan Nondiskriminatif

- a. Peningkatan penyediaan (*supply*) layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dapat terjadi bahwa kelihatannya *over-supply* artinya banyak daya tampung tidak terpakai, namun sebenarnya masih banyak anak tidak bersekolah yang seharusnya bersekolah. Dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan dijadikan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
- b. Peningkatan kesempatan (*demand*) dan keterjangkauan pendidikan. Hal ini mengingat bahwa sering terjadi penyediaan (*supply*) tidak disertai dengan peningkatan kesempatan sehingga daya tampung tidak terpakai maksimal, namun sebenarnya masih banyak anak yang mestinya sekolah tetapi tidak/ belum sekolah.
- c. Pengembangan layanan pendidikan nondiskriminatif, tidak memihak pada salah satu kelompok/golongan. Pelayanan diskriminatif dalam pendidikan hanya akan menyemai benih-benih friksi dan konflik.
- d. Pengurangan disparitas akses dan kualitas pendidikan dengan kebijakan afirmatif pada kelompok yang tertinggal, berkebutuhan khusus, atau mereka yang kondisi objektifnya

kesulitan untuk mengakses pendidikan termasuk program yang langka peminat. Demikian pula bila ada kebutuhan yang memerlukan layanan khusus, daerah perlu mengakomodasikan dengan baik, dengan ketentuan tidak menumbuhkan dampak negatif.

- e. Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dan mendukung kebijakan pendidikan menengah universal.
- f. Pengembangan pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagai indikator kemajuan pendidikan ditingkatkan jenis, kualitas, kuantitas, dan akuntabilitasnya. Jenis peran serta masyarakat dapat berupa penyelenggaraan, dukungan, kontrol, mediasi, dan pemberian bahan pertimbangan.
- g. Penguatan budaya belajar dan pembudayaan kebutuhan belajar sepanjang hayat melalui pendekatan formal, nonformal, dan informal (*continuing education and training*). *Learning society* merupakan sebuah keniscayaan agar terwujud masyarakat inovatif yang arif karena penguasaannya atas berbagai pengetahuan sesuai dengan perkembangan kehidupan. Untuk itu layanan dapat melalui pendidikan formal dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi; pendidikan nonformal misalnya melalui berbagai kelompok belajar, kursus, diklat; dan juga pendidikan informal di keluarga, tempat kerja, serta melalui media massa.

2. Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

- a. Pelembagaan muatan kebudayaan dalam pendidikan dengan melakukan pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan agama, serta orientasi kebangsaan sebagai isi dan metoda di dalam pelaksanaan pendidikan.
- b. Pengembangan pendidikan manusia seutuhnya berlandaskan modal sosial dan modal kultural. Modal sosial berupa jejaring sosial dan kehidupan saling percaya dan mempercayai sangat berharga untuk memajukan pendidikan. Modal kultural berupa pranata nilai-nilai luhur menjadi bagian terintegrasi di dalam pendidikan yang dimaksudkan membangun karakter manusia sebagai individu, bagian masyarakat, dan bangsa.

- c. Pengembangan pendidikan DIY berbasis budaya lokal dan berkarakter Indonesia yang menghargai nilai-nilai multikultural . Hal ini sebagai penegasan dan penguatan peran kebudayaan sebagai dasar dan tujuan pendidikan dengan maksud untuk pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan aset turunannya atau pentransformasian instrumentasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pendidikan berbasis budaya juga dimaksudkan untuk menghasilkan kehidupan dalam kemajemukan yang damai, saling menghargai, produktif, dan inovatif. Kemajemukan yang dimaksud mencakup beragamnya agama, etnisitas, budaya, dan kondisi sosial ekonomi.

3. Menuju Pusat Unggulan Mutu Pendidikan Nasional yang Komprehensif

DIY sebagai pusat pendidikan tidak hanya mengunggulkan pendidikan yang sarat dengan budaya, melainkan juga senantiasa harus diupayakan unggul dalam aspek kualitas pendidikan akademik dan kepribadian. Kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai upaya peningkatan peran dan kontribusi DIY dalam pengembangan mutu pendidikan secara nasional. Guna mencapai hal tersebut dirumuskan kebijakan berikut:

- a. Peningkatan posisi dan daya saing DIY dalam bidang pendidikan di tingkat nasional dan kawasan ASEAN melalui pemberdayaan dan pendayagunaan keunggulan komparatif untuk mewujudkan keunggulan kompetitif pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik pada semua jenjang di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Peningkatan posisi dan daya saing DIY dalam bidang pendidikan di tingkat nasional maupun internasional dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya pendidikan, termasuk keberadaan perguruan tinggi di DIY yang menekuni hampir semua disiplin ilmu dan keahlian. Untuk itu partisipasi aktif dalam even lomba di tingkat nasional maupun internasional merupakan kebutuhan, sehingga harus didukung melalui

proses pembinaan, seleksi, dan kompetisi yang menekankan pada nilai-nilai keunggulan dan sportivitas, bukan pemerataan. Pengurangan ketimpangan tidak dilakukan melalui pemerataan kejuaraan, melainkan dengan pembinaan yang intensif, target unggulan, kriteria terukur dan secara objektif diimplementasikan.

- b. Pembudayaan mutu pendidikan berbasis budaya melalui aliansi pendidikan (gugus menurut wilayah/ tingkat perkembangan mutu/ relasi fungsional). Kebijakan ini perlu didukung dengan penerapan pendekatan penelitian dalam inovasi pendidikan, penelitian dan pengembangan; serta penelitian tindakan. Model inovatif dalam pendidikan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi; dan pengembangannya melalui prosedur penelitian pengembangan yang baku; kemudian proses difusi dan diseminasi model prototip tidak hanya mengandalkan pendekatan struktural yang formal legalistik, melainkan dikomplementasikan dengan pendekatan kultural. Pendekatan penelitian dalam pengembangan mutu pendidikan ini dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang mengembangkan disiplin ilmu yang relevan.
- c. Kompetisi yang sehat untuk peningkatan daya saing mutu pendidikan berbasis budaya. Peningkatan daya saing mutu harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, tidak sekedar menang atau unggul tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pembangunan pendidikan DIY tidak hanya untuk menjadi pesaing yang tangguh di tingkat nasional dan internasional, melainkan juga diorientasikan memiliki andil atau menjadi acuan substantif dalam pembangunan pendidikan bagi daerah lain. Kebijakan ini terkait dengan proses difusi dan diseminasi hasil-hasil pengembangan.
- d. Pemberian awards sebagai upaya memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi, dan mewujudkan budaya mutu peningkatan kualitas pendidikan.

4. Peningkatan Peran Sinergis Pendidikan terhadap Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional dalam Konteks Global

- a. Penguatan peran pendidikan dalam lingkungan pembangunan lainnya, seperti kebudayaan, ekonomi, sosial, politik.

Pendidikan tidak hanya dituntut membangun manusia yang berkualitas, akan tetapi pembangunan manusia juga tidak pernah lepas dari satuan sosialnya, yakni lingkungan keluarga, masyarakat, daerah, bahkan lingkungan nasional dan internasional. Setiap lingkungan satuan sosial tersebut pasti mengandung unsur-unsur peningkatan kesejahteraan (ekonomi), identitas (sosial), dan pranata sistem kekuasaan (politik). Terhadap lingkungan yang multidimensional tersebut pendidikan harus dapat menjalin hubungan timbal balik yang saling menghasilkan manfaat.

- b. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Program dan kegiatan pendidikan harus diorientasikan untuk memiliki relevansi dan kontribusi yang tinggi dengan lingkungan terdekat, daerah, nasional, dan dalam konteks internasional. Pendidikan kecakapan hidup diupayakan relevan dengan pembangunan ekonomi. Pendidikan karakter mengacu pada formulasi cita-cita karakter manusia dan masyarakat yang dikehendaki. Kemudian pendidikan politik yang selama ini kurang terurus dengan baik perlu dikembangkan sehingga menghasilkan *political self* yang tepat, sehingga mampu menampilkan partisipasi aktif yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan politik.

- c. Partisipasi aktif di kawasan Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Agar pendidikan DIY tidak hanya kontekstual di tingkat daerah dan nasional, maka perkembangan tingkat internasional, minimal ASEAN perlu senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam pembangunan pendidikan. Tanpa *benchmarking* (pembanding) yang menantang, pendidikan sulit mencapai kemajuan yang berarti.

5. Penguatan Kapasitas Tatakelola Berbasis Budaya di Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan yang unggul membutuhkan dukungan tatakelola yang tepat pada intra dan antar sistem birokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya. Tatakelola (*governance*) ini mencakup urusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan sistem informasi manajemen.

- a. Pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan berbasis kinerja baik intra maupun antar sistem birokrasi.

Kewenangan perencanaan pendidikan DIY berada di otorita DIY, otorita kabupaten/kota, dan otorita tingkat satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tatanan desentralisasi pendidikan, di mana ada manajemen berbasis sekolah, dan ada otonomi daerah yang mendesentralisasikan urusan pendidikan ke daerah. Hubungan sinergis antar otorita tersebut sangat penting agar dicapai hasil yang optimal dengan sumberdaya yang berada di banyak instansi. Tidak kalah pentingnya adalah koordinasi di dalam masing-masing birokrasi yang terdiri atas beberapa unit, seperti :bidang/seksi/ urusan. Demikian pula yang terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan/ aktivitas yang dilakukan.

- b. Penerapan sistem penganggaran pendidikan yang tepat berbasis program dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prinsip *cost sharing*.

Mengingat terbatasnya sumber pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah maka tanpa koordinasi sinergis pemanfaatan dana akan kurang efektif dan efisien. Program dan kegiatan yang memiliki nilai strategis pengembangan tentunya mendapatkan prioritas, di samping anggaran untuk menghadapi situasi darurat misalnya bencana alam. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (termasuk pemerintah daerah) masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri.

- c. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.
- e. Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang terjaga kemutakhiran dan akurasinya.
SIM dalam kerangka membangun manajemen berbasis pengetahuan yang sudah merupakan keniscayaan sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat dan kebutuhan pendidikannya.

BAB V
PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
TAHUN 2014—2018

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Peningkatan aksesibilitas kesempatan pendidikan berkualitas sepanjang hayat untuk semua dan nondiskriminatif				<ul style="list-style-type: none"> • Keefektifan pendidikan untuk semua nondiskriminatif • Meningkatnya angka Rata-rata lama sekolah • Terwujudnya pendidikan berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi
a. Peningkatan penyediaan (<i>supply</i>) layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pendampingan satuan pendidikan untuk mencapai SNP 	<ul style="list-style-type: none"> • Asesmen, pemetaan dan pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan sesuai SNP • Penyediaan bantuan satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah/proporsi satuan pendidikan yang memenuhi SNP. 	
b. Peningkatan kesempatan (<i>demand</i>) dan keterjangkauan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penyisiran anak usia sekolah yang tidak bersekolah (belum terjangkau sekolah) sampai jenjang menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi, subsidi, beasiswa/ voucher atau insentif peningkatan keterjangkauan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan, seperti dari keluarga miskin, anak terlantar, rawan putus sekolah/ drop out, anak dari daerah yang sulit dijangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan angka partisipasi pendidikan (APK, APM, APS) 	
c. Pengembangan layanan pendidikan nondiskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan satuan pendidikan dalam pelaksanaann pendidikan nondiskriminatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model layanan pendidikan nondiskriminatif • Lokakarya dan pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan layanan pendidikan nondiskriminatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan layanan pendidikan nondiskriminatif 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
d. Pengurangan disparitas akses dan kualitas pendidikan dengan kebijakan afirmatif pada kelompok yang tertinggal, berkebutuhan khusus, atau mereka yang kondisi objektifnya kesulitan untuk mengakses pendidikan termasuk program yang langka peminat	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan afirmatif untuk: <ul style="list-style-type: none"> Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Daerah/ kelompok masyarakat tertinggal pendidikannya Masyarakat yang belum atau masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan Layanan khusus/ rehabilitatif Kesetaraan gender Program pendidikan keunggulan daerah yang langka peminat 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan pemetaan disparitas akses dan kualitas pendidikan Fasilitasi pengurangan disparitas akses dan kualitas pendidikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pengembangan sekolah inklusi Pemberdayaan wilayah (kecamatan) dan kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam pendidikan Kesetaraan gender di bidang pendidikan Penguatan program yang langka peminat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah ABK yang mendapat layanan pendidikan Berkurangnya tingkat disparitas antar: <ul style="list-style-type: none"> Wilayah (Kabupaten/kota, kecamatan) Kelompok sosial ekonomi Gender 	
e. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan dan mendukung kebijakan pendidikan menengah universal	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan anak usia dini Fasilitasi, subsidi atau insentif untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan angka partisipasi PAUD formal (TK, RA/BA) dan nonformal (TPA, KB, dan Satuan PAUD Sejenis). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan ketuntasan wajar dikdas 9 th 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan putus sekolah di pendidikan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan angka partisipasi Pendidikan Dasar (APK, APM) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pendidikan menengah universal melalui perluasan, 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis kebutuhan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam mendukung pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah umum dan kejuruan (APK, APM) 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	pemerataan, dan penataan pendidikan menengah umum dan kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> menengah universal • Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan menengah umum dan kejuruan • Sistem insentif untuk pendidikan menengah. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah mahasiswa melalui pemberian bantuan bea mahasiswa tidak mampu dan promosi pendidikan ke luar daerah • Fasilitasi pembinaan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah mahasiswa • Peningkatan inovasi mahasiswa di berbagai bidang 	
f. Pengembangan pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pendidikan berbasis masyarakat pada semua jalur dan jenjang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, sektor swasta, dunia usaha dan industri serta pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peranserta masyarakat terhadap pendidikan 	
g. Penguatan budaya belajar dan pembudayaan kebutuhan belajar sepanjang hayat melalui pendekatan formal, nonformal, dan informal (<i>continuing education and training</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kondisi dan tuntutan perubahan lingkungan makro pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis/ Asesmen trend perubahan masyarakat (ekonomi/ketenagakerjaan, kebudayaan, politik, ipteks dan dampaknya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan data lingkungan makro pendidikan (ekonomi, sosial budaya, politik, ipteks, alam, demografi) 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pendidikan nonformal dan informal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan program pendidikan nonformal dan informal: <ol style="list-style-type: none"> Keaksaraan dan kesetaraan Pendidikan masyarakat Pendidikan Kecakapan hidup Kursus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat Pengarusutamaan gender bidang pendidikan Home schooling Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga Pelestarian dan pemberdayaan nilai-budaya luhur pendidikan politik/ kewarga negaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) <i>continuing education and training</i> melalui berbagai media 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan kecakapan hidup yang relevan dan terstandar Peningkatan aktivitas dan prestasi pemuda dan olahraga Peningkatan aktivitas seni budaya Peningkatan KIE kecakapan kewarganegaraan (<i>civic skills</i>) peningkatan KIE <i>continuing education and training</i> melalui berbagai media 	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kuantitas dan kualitas perpustakaan di berbagai satuan pendidikan dan masyarakat Fasilitasi dan pemberdayaan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan museum dan cagar budaya sebagai sumber belajar dan media pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama pemanfaatan museum Penguatan gerakan kunjung museum 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kunjungan ke museum 	
ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
2. Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya				<ul style="list-style-type: none"> Terwujudan sistem pendidikan yang memfasilitasi pembentukan manusia yang mampu melestarikan nilai luhur & mengaktualisasikannya secara kontekstual Terwujudnya pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga menjadi warga negara yang baik, maju, damai dalam kemajemukan dan berkarakter Pancasila
d. Pelembagaan muatan kebudayaan dalam pendidikan dengan melakukan pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan agama, serta orientasi kebangsaan sebagai isi dan metoda di dalam pelaksanaan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi nilai-nilai luhur berbasis agama, budaya, Pancasila, kehidupan nasional/global yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat Pengembangan model pendidikan berbasis budaya Penguatan sumber daya pendukung pendidikan karakter berbasis budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Riset nilai-nilai luhur budaya Pengembangan model pendidikan berbasis budaya Difusi prototip pendidikan berbasis budaya Pendekatan <i>social action</i> pada tingkat satuan pendidikan dan kelas/ rombongan belajar Penyediaan dan pengembangan Sumber daya pendukung pendidikan karakter berbasis budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Model-model integratif pendidikan (satuan pendidikan) berbasis budaya Penerapan dan pendiseminasian model Terwujudnya kebudayaan sebagai isi, dan metode pendidikan Konservasi dan transformasi budaya Tersedianya sumber daya pendukung pendidikan karakter berbasis budaya 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
e. Pengembangan pendidikan manusia seutuhnya berlandaskan modal sosial dan modal kultural	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi modal sosial yang potensial dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan Pengembangan kelembagaan pendidikan berbasis modal sosial Pengembangan pendidikan multikultural 	<ul style="list-style-type: none"> Riset modal sosial Pengembangan model pendidikan berbasis modal sosial Difusi prototip pendidikan berbasis modal sosial Pendekatan <i>social action</i> pengembangan pendidikan berbasis modal sosial Pengembangan model, perangkat, dan buku acuan pendidikan multikultural Implementasi pendidikan multikultural 	<ul style="list-style-type: none"> Model-model pendidikan(satuan pendidikan) berbasis modal sosial Penerapan dan pendiseminasian model Pemanfaatan modal sosial dalam pendidikan Konservasi dan transformasi modal sosial Buku acuan pendidikan multikultural Pemanfaatan integratif kontekstual Satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan multikultural 	
f. Pengembangan pendidikan DIY yang berbasis budaya lokal dan berkarakter Indonesia yang menghargai nilai-nilai multikultural	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi dasar peserta didik agar berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik, anti korupsi, dan keteladanan baik Pengembangan sikap warganegara yang cinta damai,kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni Pengembangan insan yang cerdas, berbudi luhur, dan mampu berkontribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan perangkat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. Fasilitasi penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan budaya lokal Fasiitasi pengembangan kurikulum sesuai dengan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya perangkat kebijakan tingkat DIY dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. Terwujudnya bahan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan budaya lokal Tersusunnya kurikulum di seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang berbasis 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<p>terhadap pengembangan kehidupan umat manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan museum dan cagar budaya sebagai sumber belajar dan media pendidikan karakter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk melaksanakan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. 	<p>kearifan lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sarana, prasarana, dan biaya untuk melaksanakan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. ▪ Model pendidikan(satuan pendidikan) berbasis budaya lokal dan berkarakter Indonesia 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. Menuju Pusat Unggulan Mutu Pendidikan Nasional yang Komprehensif				Terwujudnya pusat mutu pendidikan holistik sebagai acuan nasional yang handal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan ▪ Hubungan sinergis melembaga: formal – nonformal - informal ▪ Prestasi nasional/ internasional <p>Sustainabilitas dan akuntabilitas pembudayaan mutu pendidikan DIY.</p> <p>Kontribusi kreatif DIY dalam pembangunan pendidikan nasional yg berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model pendidikan inovatif ▪ Model manajemen sinergis dalam pembangunan pendidikan
a. Peningkatan posisi dan daya saing DIY dalam bidang pendidikan di tingkat nasional, dan kawasan ASEAN melalui pemberdayaan dan pendayagunaan keunggulan komparatif untuk mewujudkan keunggulan kompetitif pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik pada semua jenjang di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.	Gerakan pendidikan bermutu melalui pemenuhan SNP, improvisasi, dan inovasi pendidikan berbasis budaya berdasarkan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • (Penelitian) tindakan yg bermanfaat langsung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di tingkat kelas ○ Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) di tingkat satuan pendidikan (manajemen mutu) 	Peningkatan dan pembudayaan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian/ pengembangan model peningkatan mutu pendidikan sesuai SNP 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan (R,D,D) untuk menghasilkan model dan diseminasinya. 	Kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi/lembaga pusat/daerah,dan organisasi lainnya dalam R,D & D (riset, pengembangan, dan difusi model peningkatan mutu pendidikan) dan PTK/PTS: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas output dan outcomes pendidikan • Peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran 	Hasil-hasil penelitian pengembangan pendidikan berbasis budaya yang siap diimplementasikan dan penelitian tindakan yang siap dilembagakan.	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas input: SDM, sarpras, program; kepemimpinan dan manajemen pendidikan <p>Penyusunan dan panduan peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan berbasis budaya</p> <p>Sosialisasi, lokakarya, dan pendampingan dalam penerapan panduan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya</p>	<p>Panduan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya berdasarkan hasil-hasil penelitian (RDD, PTK/PTS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan pengembangan kualitas proses KBM. Panduan pengembangan sistem evaluasi program satuan pendidikan dan asesmen hasil belajar Panduan pengembangan input: SDM, fasilitas pendidikan , program / kurikulum pendidikan Panduan penguatan kepemimpinan dan manajemen mutu pendidikan <p>Satuan pendidikan yang mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya</p>	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Pegembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Pengembangan pembelajaran berbasis TIK	Meningkatnya satuan pendidikan yang mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK	
b. Pembudayaan mutu pendidikan berbasis budaya melalui <u>aliansi pendidikan</u> (gugus menurut : wilayah/ tingkat perkembangan mutu/ relasi fungsional)	<p>Peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya secara sinergis komprehensif berkelanjutan melalui jejaring kerjasama antar satuan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antar pendidikan formal • Antar pendidikan nonformal, LKP, SPS • Antara pendidikan formal dan nonformal (misal: sekolah dengan Kejar Paket A/B/C; LPK dengan SMK) 	<p>Penerapan pendekatan kultural sebagai komplementasi pendekatan legal struktural dalam pengembangan berbagai aliansi pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jejaring peningkatan mutu pendidikan sekolah/ madrasah; PAUD, dikdas, dikmen umum/ kejuruan, tingkat daerah, nasional, dan internasional. • Jejaring peningkatan mutu pendidikan nonformal tingkat daerah dan nasional • Jejaring peningkatan mutu pendidikan antara pendidikan formal dan nonformal pada tingkat lokal, daerah dan nasional. • Mensinergikan pendidikan formal, nonformal, dan informal (keluarga, komunitas, media masa, tempat kerja) 	<p>Keefektifan jejaring (aliansi) pendidikan berbasis budaya diindikasikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlaksanaan dan kemanfaatan program antar sekolah/madrasah dan di masing-masing sekolah/ madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. • Keterlaksanaan dan kemanfaatan program antar dan intra satuan PNF. • Keterlaksanaan program intra satuan PNF, dan antara satuan PNF dengan sekolah; dan kemanfaatannya bagi satuan PNF. • Keterlaksanaan dan kemanfaatan program sinergis antara satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. 	Tumbuhnya kultur mutu yang terintegrasi dalam kelembagaan pendidikan berbasis budaya difasilitasi dengan jejaring pendidikan

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
c. Kompetisi yang sehat untuk peningkatan daya saing mutu pendidikan berbasis budaya	Penyediaan hibah kompetitif peningkatan dan kompetisi mutu dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan akhlak, karakter berwawasan kebangsaan • Akademik (sains dan humaniora) • Teknologi dan kecakapan hidup • Seni (musik, tari, lukis, rupa, sastra, drama, teater) • Kepemudaan dan Olahraga 	Pemanduan individu berbakat (<i>talent scouting</i>) dalam bidang akademik, teknologi, seni, kepemudaan, dan olahraga Penguatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan berbasis budaya dalam berbagai bidang. Jambore dan Olimpiade/lomba berlapis, dalam berbagai bidang.. Penyediaan dan pendayagunaan (akses) fasilitas olah raga	Peningkatan prestasi, perolehan kejuaraan dan peningkatan peringkat DIY di dalam berbagai even olimpiade/ lomba tingkat nasional dan internasional. Berkurangnya disparitas mutu dan prestasi dalam berbagai bidang dengan terangkatnya kapasitas dan prestasi kelompok lapisan bawah. Keterlaksanaan dan kemanfaatan jambore dan olimpiade/lomba berlapis. Tersedia fasilitas olahraga di setiap satuan pendidikan	Tumbuhnya budaya berprestasi unggul dan sportivitas dalam pendidikan
d. Pemberian awards sebagai upaya memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi, dan mewujudkan budaya mutu peningkatan kualitas pendidikan.	Pemberian penghargaan berdasar prestasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, dan satuan pendidikan pada tingkat lokal, daerah, nasional, dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian beasiswa dan insentif lainnya bagi mereka yang berprestasi 	Pemecahan rekor. Pemeliharaan dan atau peningkatan prestasi/ peringkat Munculnya individu dan satuan pendidikan baru dalam pemecahan rekor dan prestasi.	Tumbuhnya strategi kultural dalam mewujudkan kinerja pendidikan berbasis budaya yang bermutu.

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. Peningkatan Peran Sinergis Pendidikan terhadap Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional dalam Konteks Global				Terwujudnya pusat pendidikan berbasis budaya sebagai acuan yang handal di Asia Tenggara dengan mewujudkan pendidikan yang relevan dengan pembangunan.
a. Penguatan peran pendidikan dalam pembangunan kebudayaan	Pengembangan pendidikan nilai-nilai dan aset budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan konservasi dan atau transformasi budaya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend perubahan kebudayaan ▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebudayaan, mendukung pelestarian/ trnasformasi budaya • Pembentukan forum (wadah) internasional pengembangan profesi dan sistem pendidikan dengan tujuan: a) berbagi data/ informasi; dan b) tukar (<i>exchange</i>) peserta didik, SDM ▪ Monev dan pendampingan 	<p>Keterlaksanaan dan pemanfaatan pendidikan ketahanan, kelestarian, dan transformasi kebudayaan secara formal, nonformal, dan informal yang menguatkan jatidiri budaya DIY secara kontekstual.</p> <p>Aktivitas berskala internasional (minimal tingkat ASEAN)</p> <p>Prestasi dalam forum internasional (minimal tingkat ASEAN)</p>	Penguatan jatidiri DIY sesuai dengan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan dalam konstelasi kebudayaan nasional
b. Penguatan peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pelatihan kejuruan yang bersesuaian dengan perkembangan kebutuhan (<i>needs</i>) kompetensi tenaga kerja daerah, nasional, dan regional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend perkembangan perekonomian dan prakiraan kebutuhan tenaga kerja. ▪ Pengembangan dan penyelenggaraan 	Keterlaksanaan dan pemanfaatan pendidikan formal, pelatihan nonformal, dan penyuluhan informal yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam konteks pembangunan ekonomi daerah,	<p>Peningkatan tingkat kesejahteraan atau penurunan kemiskinan.</p> <p>Peningkatan daya serap output pendidikan dan pelatihan kejuruan</p>

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		<p>pendidikan kecakapan hidup, dan atau pelatihan kejuruan pada pendidikan formal, nonformal dan informal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan akademi komunitas sebagai pusat pelatihan ▪ Monev dan pendampingan 	nasional, dan perkembangan ekonomi global.	Penurunan angka pengangguran
c. Penguatan peran pendidikan dalam pembangunan politik	Pengembangan pendidikan kebangsaan yang peduli terhadap kepentingan nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend perubahan orientasi dan sistem politik ▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebutuhan partisipasi dan integrasi politik bangsa. ▪ Monev dan pendampingan 	Keterlaksanaan dan kemanfaatan pendidikan politik secara formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan budaya berpolitik dan antisipasi perkembangan politik di tingkat daerah, nasional, dan global	<p>Kesadaran historis kejogjaan dalam perkembangan kedaulatan politik bangsa.</p> <p>Peningkatan partisipasi politik baik kuantitas maupun kualitas dalam proses-proses politik.</p>
d. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Pengembangan pendidikan berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang berorientasi sustainabilitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend kondisi dan perubahan lingkungan alam dan teknologi ▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kondisi dan perubahan lingkungan alam dan teknologi. Contoh: pendidikan mitigasi bencana. ▪ Monev dan pendampingan 	Keterlaksanaan dan kemanfaatan pendidikan untuk pembudayaan pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan kebencanaan secara formal, nonformal, dan informal	<p>Kesiagaan menghadapi bencana.</p> <p>Terwujudnya green province</p> <p>Terwujudnya cyber province yang sehat dan akuntabel</p>

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
e. Partisipasi aktif di kawasan Asia Tenggara dalam bidang pendidikan	Menjalin kerja sama dengan otorita/ penyelenggara pendidikan di tingkat/kawasan ASEAN dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Forum (wadah) internasional pengembangan profesi dan sistem pendidikan • Berbagi data/ informasi • Tukar (<i>exchange</i>) peserta didik, SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pendidikan berskala internasional (minimal ASEAN) 	Terwujudnya rekognisi di kawasan ASEAN dalam hubungan saling menguntungkan.
5. Penguatan Kapasitas Tatakelola Berbasis Budaya di bidang pendidikan				Terwujudnya tatakelola pendidikan yang baik dan berbudaya
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan berbasis kinerja baik intra dan antar sistem birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kapasitas satuan-satuan kerja perencanaan DIY dan kabupaten/kota ▪ Sinkronisasi perencanaan internal DIY dengan kabupaten/kota dan kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan tupoksi unit perencanaan, ▪ Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinergitas tugas pokok dan fungsi unit perencanaan DIY, kabupaten/kota ▪ Rencana pengembangan pendidikan yang sinergis antara DIY dengan kabupaten/kota 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan sistem penganggaran pendidikan berbasis program dan akuntabel yang sesuai peraturan perundangan dengan prinsip <i>cost sharing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan regulasi penganggaran pendidikan ▪ Penerapan Sistem Perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan (PPBS) pembangunan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan regulasi penganggaran pendidikan yang sinergis. ▪ Koordinasi dan sinkronisasi penganggaran pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya regulasi penganggaran pendidikan ▪ Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, dan Kegiatan pendidikan DIY yang sinergis dengan kabupaten/kota. 	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan yang responsibel dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program/ kegiatan sesuai rencana, memenuhi ketentuan perundangan, dan bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya sasaran program/ kegiatan secara optimal 	
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan software/ instrument monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan yang akurat dan komprehensif 	
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang terjaga kemutakhiran dan akurasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SIM terpadu pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sinergitas operasional SIM pendidikan DIY dan kabupaten/kota secara terpadu Evaluasi penerapan dan pendayagunaan SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja menyelenggarakan layanan berbasis SIM 	

BAB VI
TARGET RENSTRA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
TAHUN 2014 – 2018

1. Peningkatan Aksesibilitas Kesempatan Pendidikan Berkualitas untuk Semua Sepanjang Hayat dan Nondiskriminatif.

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
Fasilitasi dan pendampingan satuan pendidikan terutama yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen, pemetaan dan pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan sesuai SNP Penyediaan bantuan satuan pendidikan 	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP / SSN / Terakreditasi A							
		PAUD	%	31,49	40	45	50	55	60
		SD/MI/Sederajat	%	33,22	45	50	60	65	70
		SMP/MTs/Sederajat	%	59,21	65	70	75	80	85
		Sekolah Menengah/Sederajat	%	64,55	70	75	80	85	90
Pemetaan dan penyisiran anak usia sekolah yang tidak bersekolah (belum terjangkau sekolah) sampai jenjang menengah	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, subsidi, beasiswa/ voucher atau insentif peningkatan keterjangkauan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan, seperti dari keluarga miskin, anak terlantar, rawan putus sekolah/ drop out, anak dari daerah yang sulit dijangkau 	Menurunnya angka putus sekolah							
		SD/MI/Sederajat	%	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
		SMP/MTs/Sederajat	%	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
		Sekolah Menengah/Sederajat	%	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
		Meningkatnya anak putus sekolah yang terlayani bersekolah kembali							
		SD/MI/Sederajat	%		60	70	80	90	100
		SMP/MTs/Sederajat	%		60	70	80	90	100
		Sekolah Menengah/Sederajat	%		60	70	80	90	100
Pemberdayaan satuan pendidikan dalam pelayanan pendidikan nondiskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model layanan pendidikan nondiskriminatif Pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan layanan pendidikan nondiskriminatif 	% jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan model layanan pendidikan nondiskriminatif	%	0	5	15	25	35	50
<ul style="list-style-type: none"> Tindakan afirmatif untuk: <ul style="list-style-type: none"> Anak Berkebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan pemetaan disparitas kesempatan akses dan kualitas 	Peningkatan APK ABK	%	92,03	94	95	96	97	98
		Berkurangnya indeks paritas antar wilayah (Kabupaten/kota,							

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
Khusus (ABK) <ul style="list-style-type: none"> Daerah/ kelompok masyarakat tertinggal pendidikannya Masyarakat yang belum atau masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan Layanan khusus/rehabilitatif 	pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Pengurangan disparitas akses dan mutu pendidikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SLB Pengembangan sekolah inklusi Pemberdayaan daerah/ wilayah dan kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan pendidikan Kesetaraan gender Program pendidikan keunggulan daerah yang langka peminat 	kecamatan)							
		Indeks Paritas APK SD/MI/Sederajat	%	38,62	36	34	32	30	28
		Indeks Paritas APK SMP/MTs/Sederajat	%	24,04	20	19	18	17	16
		Indeks Paritas APK Sekolah Menengah/Sederajat	%	58,27	54	50	46	42	30
<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, subsidi atau insentif untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia dini 	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar(APK) PAUD formal (TK, RA/BA) dan nonformal (TPA, KB, dan Satuan PAUD Sejenis)	%	78,13	82	84	86	88	90
<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan ketuntasan wajar dikdas 9 th 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan angka putus sekolah di pendidikan dasar Menarik kembali siswa putus sekolah (gerakan kembali ke sekolah) 	Membaiknya Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan Dasar							
		• APK SD/MI/Sederajat	%	111,43	110	110	110	110	110
		• APK SMP/MTs/Sederajat	%	115,50	112	112	112	112	112
		Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar							
		• APM SD/MI/Sederajat	%	97,53	98	98	99	99	99
		• APM SMP/MTs/Sederajat	%	81,03	84	85	86	87	88
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pendidikan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis kebutuhan pendidikan menengah umum dan kejuruan 	Peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah umum dan kejuruan (APK, APM)							

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
universal melalui perluasan, pemerataan, dan penataan pendidikan menengah umum dan kejuruan	dalam mendukung pendidikan menengah universal 12 tahun <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan menengah umum dan kejuruan • Sistem insentif untuk pendidikan menengah. 	• APK Sekolah Menengah/Sederajat	%	88,79	90	91	92	93	94
		APM Sekolah Menengah/Sederajat	%	63,45	66	67	68	69	70
• Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah mahasiswa melalui pemberian bantuan bea mahasiswa tidak mampu dan promosi pendidikan ke luar daerah • Fasilitasi pembinaan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa 	• Peningkatan jumlah mahasiswa	Orang	272.647	274.000	275.500	277.000	278.500	280.000
• Penelitian kondisi dan tuntutan perubahan lingkungan makro pendidikan	• Analisis/ Asesmen trend perubahan masyarakat (ekonomi/ketenagakerjaan, kebudayaan, politik, ipteks dan dampaknya)	Ketersediaan data lingkungan makro pendidikan (ekonomi, sosial budaya, politik, ipteks, alam, demografi)	Topik	-	1	3	6	6	6
• Pengembangan program pendidikan nonformal dan informal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan program pendidikan nonformal dan informal: <ul style="list-style-type: none"> l) Keaksaraan dan kesetaraan m) Pendidikan masyarakat n) Pendidikan Kecakapan hidup o) Kursus p) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat q) Taman Bacaan Masyarakat 	Peningkatan jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan kecakapan hidup yang relevan dan terstandar	Orang	5000	7000	9000	12000	15000	20000
		Peningkatan prestasi olahraga							
		SD/MI/Sederajat	Cabang	2	3	3	4	4	5
		SMP/MTs/Sederajat	Cabang	2	3	4	4	5	5

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
	r) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Sekolah Menengah/Sederajat	Cabang	2	3	4	4	5	5
	s) pendidikan politik/ kewarga negaraan t) Home Schooling u) Peningkatan pendidikan olahraga v) Pelestarian dan pemberdayaan nilai-budaya luhur	Peningkatan prestasi seni-budaya siswa	Cabang	2	3	4	4	5	5
	• Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) <i>continuing education and training</i> melalui berbagai media	• KIE melalui berbagai media	paket	4	5	5	6	6	6
	• Pengembangan Perpustakaan	• Pemetaan kuantitas dan kualitas perpustakaan di berbagai satuan pendidikan dan masyarakat • Fasilitasi dan pemberdayaan perpustakaan							
		Tersedia fasilitas perpustakaan yang layak di setiap satuan pendidikan :							
		SD/MI/Sederajat	%	45	48	50	55	60	65
		SMP/MTs/Sederajat	%	88	90	92	94	97	100
		Sekolah Menengah/Sederajat	%	90	92	94	96	98	100

2. Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi nilai-nilai luhur berbasis agama, budaya, Pancasila, kehidupan nasional/global yg sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat Pengembangan model pendidikan berbasis budaya Penguatan sumber daya pendidikan karakter berbasis budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Riset nilai-nilai luhur budaya Pengembangan model pendidikan berbasis budaya Difusi prototip pendidikan berbasis budaya Pendekatan <i>social action</i> pada tingkat satuan pendidikan dan kelas/ rombongan belajar Penyediaan dan pengembangan Sumber daya pendidikan karakter berbasis budaya 	<p>Tersedia hasil riset/panduan satuan pendidikan berbasis budaya yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Model-model integratif pendidikan (satuan pendidikan) berbasis budaya Penerapan dan pendiseminasian model Kebudayaan sebagai isi, dan metode pendidikan Konservasi dan transformasi budaya 	set		2	4	6	8	10
		<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber daya pendidikan karakter berbasis budaya 	%		10	25	40	60	80
<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi modal sosial yang potensial dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan Pengembangan kelembagaan pendidikan berbasis modal sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Riset modal sosial Pengembangan model pendidikan berbasis modal sosial Difusi prototip pendidikan berbasis modal sosial Pendekatan <i>social action</i> pengembangan pendidikan berbasis modal sosial 	<p>Tersedia hasil riset/panduan satuan pendidikan berbasis modal sosial yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Model-model pendidikan (satuan pendidikan) berbasis modal sosial Penerapan dan pendiseminasian model Pemanfaatan modal sosial dalam pendidikan 	set		1	2	3	4	5

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
		<ul style="list-style-type: none"> Konservasi dan transformasi modal sosial 							
		Satuan pendidikan menerapkan pendidikan berbasis modal sosial	%		5	10	15	20	25
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pendidikan multikultural 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model, perangkat, dan buku acuan pendidikan multikultural Implementasi pendidikan multikultural 	Buku acuan pendidikan multikultural	set		1	2	3	4	5
		Satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan multikultural	%		10	20	30	40	50
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi dasar peserta didik agar berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik, anti korupsi, dan keteladanan baik Pengembangan sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni Pengembangan insan yang cerdas, berbudi luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia Pengembangan museum dan cagar budaya sebagai sumber belajar dan media pendidikan karakter 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan perangkat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. Fasilitasi penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan budaya lokal Fasilitasi pengembangan kurikulum sesuai dengan kearifan lokal Pemberian dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk melaksanakan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan. 	Tersusunnya perangkat kebijakan tingkat DIYi dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan kepramukaan.	set		10	12	14	16	18
		Terwujudnya bahan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan budaya	set		1	2	3	4	5
		Tersusunnya kurikulum di seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang berbasis budaya	set			1	1	1	1
		Satuan pendidikan yang mengembangkan pendidikan berbasis budaya	%		10	20	30	40	60

3. Menuju Pusat Unggulan Mutu Pendidikan Nasional yang Komprehensif

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Gerakan pendidikan bermutu melalui pemenuhan SNP, improvisasi, dan inovasi berbasis budaya berdasarkan penelitian: Penelitian tindakan yg bermanfaat langsung: <ul style="list-style-type: none"> PTK di tingkat kelas PTS di tingkat satuan pendidikan (manajemen mutu) 	Peningkatan dan pembudayaan mutu pendidikan di semua jenjang di jalur formal, nonformal, informal	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian/model peningkatan mutu pendidikan sesuai SNP 	Tema		2	4	6	8	10
<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan pengembangan (R,D,D) untuk menghasilkan model dan diseminasi peningkatan mutu pendidikan. 	Kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi/lembaga pusat/daerah ,dan organisasi lainnya dalam R,D & D (riset, pengembangan, dan difusi model peningkatan mutu pendidikan) dan PTK/PTS: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas output dan outcomes pendidikan Peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran Peningkatan kualitas input: SDM, sarpras, program; kepemimpinan dan manajemen pendidikan 	Hasil-hasil penelitian/model pengembangan pendidikan berbasis budaya yang siap diimplementasikan dan penelitian tindakan yang siap dilembagakan.	Tema		1	2	4	6	8

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
	Penyusunan dan penerbitan panduan peningkatan mutu pendidikan pengembangan pendidikan berbasis budaya	Panduan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya berdasarkan hasil-hasil penelitian (RDD, PTK/PTS): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan pengembangan kualitas proses KBM. ▪ Panduan pengembangan sistem evaluasi program satuan pendidikan dan asesmen hasil belajar ▪ Panduan pengembangan input: SDM, fasilitas, program kurikulum pendidikan ▪ Panduan penguatan kepemimpinan dan manajemen mutu pendidikan 	set			2	4	6	8
	Sosialisasi, lokakarya, dan pendampingan dalam penerapan panduan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya	Satuan pendidikan yang mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya	%				20	40	60
• Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Pengembangan pembelajaran berbasis TIK	Satuan pendidikan menerapkan pembelajaran berbasis TIK	%	40	45	50	55	60	70
• Peningkatan mutu pendidikan berbasis budaya secara	Penerapan pendekatan kultural sebagai komplementasi pendekatan legal struktural dalam	Terbangunnya jejaring (aliansi) pendidikan berbasis budaya yang efektif:							

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<p>sinergis komprehensif berkelanjutan melalui Jejaring kerjasama antar satuan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Antar pendidikan formal Antar pendidikan nonformal, LKP, SPS Antara pendidikan formal dan nonformal (misal: sekolah dengan Kejar Paket A/B/C; LPK dengan SMK) 	<p>pengembangan berbagai aliansi pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jejaring peningkatan mutu pendidikan sekolah/ madrasah; PAUD, dikdasmen, umum/ kejuruan; , tingkat daerah, nasional, dan internasional. Jejaring peningkatan mutu pendidikan nonformal tingkat daerah dan nasional Jejaring peningkatan mutu pendidikan antara pendidikan formal dan nonformal, pada tingkat lokal, daerah dan nasional. Mensinergikan pendidikan formal, nonformal, dan informal (keluarga, komunitas, media masa, tempat kerja) 	Antar sekolah/madrasah	aliansi		4	8	12	16	20
		Antar dan intra satuan PNF	aliansi		2	4	6	8	10
		Satuan PNF dengan sekolah	aliansi			2	4	6	8
		Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal	aliansi				1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hibah kompetitif peningkatan dan kompetisi mutu dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan akhlak, karakter berwawasan kebangsaan Akademik (sains dan humaniora) Teknologi dan kecakapan hidup 	<p>Pemanduan individu berbakat (<i>talent scouting</i>) dalam bidang akademik, teknologi, seni, kepemudaan, dan olahraga</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan berbasis budaya,</p>	Peningkatan prestasi/perolehan kejuaraan dalam berbagai kejuaraan/olimpiade tingkat nasional							
		PAUD	cabang	1	1	2	2	3	3
		SD/MI/Sederajat	cabang	2	3	3	4	4	5
		SMP/MTs/Sederajat	cabang	3	4	4	4	5	5

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Seni (musik, tari, lukis, rupa, sastra, drama, teater) Kepemudaan dan Olahraga 	dalam sains, teknologi, seni, dan olahraga. Jambore dan Olimpiade berlapis, dalam sains, teknologi, seni, kepemudaan dan olahraga.	Sekolah Menengah/Sederajat	cabang	6	8	8	9	9	10
		PLB	cabang	2	3	3	4	4	5
		PNFI	cabang	3	4	4	4	5	5
		Peningkatan prestasi/ perolehan kejuaraan dalam berbagai even internasional							
		SMP/MTs/Sederajat	even	1	1	2	2	3	3
		Sekolah Menengah/Sederajat	even	2	2	3	3	4	4
		PLB	even	1	1	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian penghargaan berdasar prestasi peserta didik, pendidik, pimpinan, dan satuan pendidikan; pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian beasiswa dan insentif lainnya bagi mereka yang berprestasi 	Peserta didik berprestasi	orang	200	300	400	500	600	700
		PTK berprestasi	orang	5	5	10	10	15	15
		Pimpinan berprestasi	orang	1	2	3	4	5	6
		Satuan pendidikan berprestasi	orang	2	4	6	8	10	12

4. Peningkatan Peran Sinergis Pendidikan terhadap Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional dalam Konteks Global

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
Pengembangan pendidikan nilai-nilai dan aset budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dengan tujuan konservasi dan atau transformasi budaya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend perubahan kebudayaan ▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebudayaan, mendukung pelestarian/ transformasi budaya • Pembentukan forum (wadah) internasional pengembangan profesi dan sistem pendidikan dengan tujuan: a) berbagi data/informasi; dan b) tukar (<i>exchange</i>) pesertadidik, SDM ▪ Monev dan pendampingan 	Rumusan model pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebudayaan, mendukung pelestarian/ transformasi budaya	set				1	1	1
		Satuan pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan ketahanan, kelestarian, dan transformasi kebudayaan, secara formal, nonformal, dan informal; yang menguatkan jatidiri budaya DIY secara kontekstual.	sekolah					10	20
		Aktivitas berskala internasional (minimal ASEAN)	kegiatan				1	1	2
		Satuan pendidikan yang beraliansi dengan satuan pendidikan tingkat internasional (minimal ASEAN)	sekolah	20	25	30	35	40	45
		Prestasi dalam forum internasional (minimal ASEAN)	even	4	4	6	6	8	8
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pelatihan kejuruan yang bersesuaian dg perkembangan kebutuhan (<i>needs</i>) kompetensi tenaga kerja daerah, nasional, dan regional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis trend perkembangan perekonomian dan prakiraan kebutuhan tenaga kerja. ▪ Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, dan atau pelatihan kejuruan pada pendidikan formal, nonformal 	Kajian trend perkembangan perekonomian dan prakiraan kebutuhan tenaga kerja	set			1	1	1	1
		Model pendidikan formal, pelatihan nonformal, dan penyuluhan informal yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam konteks pembangunan	model			1	2	3	4

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
	dan informal	ekonomi daerah, nasional, dan perkembangan ekonomi global.							
	▪ Monev dan pendampingan	Satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan kecakapan hidup	satuan pendidikan				50	100	150
• Pengembangan pendidikan kebangsaan yang peduli terhadap kepentingan nasional	▪ Analisis trend perubahan orientasi dan sistem politik	Hasil kajian trend perubahan orientasi dan sistem politik	set				1	1	1
	▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebutuhan partisipasi dan integrasi politik bangsa.	Model pendidikan politik secara formal, nonformal, dan informal; sesuai dengan kebutuhan budaya berpolitik dan antisipasi perkembangan politik di tingkat daerah, nasional, dan global	satuan pendidikan					5	10
	▪ Monev dan pendampingan								
• Pengembangan pendidikan berbasis teknologi komunikasi dan informasi, yang berorientasi sustainabilitas lingkungan	▪ Analisis trend kondisi dan perubahan lingkungan alam dan teknologi	Hasil kajian trend kondisi dan perubahan lingkungan alam dan teknologi	set			1	1	1	1
	▪ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kondisi dan perubahan lingkungan alam dan teknologi. Contoh: pendidikan mitigasi bencana.	Model pendidikan untuk pembudayaan pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan kebencanaan; secara formal, nonformal, dan informal	satuan pendidikan				5	10	15
	▪ Monev dan pendampingan								
• Menjalinkan kerjasama dengan otorita/ penyelenggara pendidikan di tingkat kawasan ASEAN dan internasional	• Forum (wadah) internasional pengembangan profesi dan sistem pendidikan	• Aktivitas pendidikan berskala internasional (minimal ASEAN)	kegiatan				1	1	2
	• Berbagi data/ informasi								
	• Tukar menukar (<i>exchange</i>) peserta didik, SDM								

5. Penguatan Kapasitas Tatakelola Berbasis Budaya di Bidang Pendidikan

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas unit kerja perencanaan DIY dan kabupaten/kota Sinkronisasi perencanaan pendidikan DIY dengan kabupaten/kota dan Kanwil Kementerian Agama 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kinerja unit perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan pendidikan DIY yang sinergis dan terpadu 	set		2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan 								
<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan pedoman pembiayaan pendidikan Penerapan Sistem Perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan (PPBS) pembangunan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman penganggaran pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya pedoman penganggaran pendidikan 	set		1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi penganggaran pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendidikan DIY yang akurat dan akuntabel 	set		1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan yang responsibel dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program/ kegiatan sesuai rencana, ketentuan perundangan, dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya sasaran program/ kegiatan secara optimal 	%	99	100	100	100	100	100
		<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya daya serap keuangan secara optimal 	%	88	≥90	≥91	≥92	≥93	≥94
		<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya laporan pelaksanaan program/ kegiatan yang lengkap dan akurat 	set		1	2	3	4	5

KEBIJAKAN OPERASIONAL	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Satuan	Kondisi awal (2011)	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dalam rangka akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan software/ instrument monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan Laporan hasil monitoring dan evaluasi 	paket / set		1	1	1	1	1
			dokumen		1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SIM terpadu pembangunan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sinergitas operasional SIM pendidikan DIY dan kabupaten/kota berbasis web Evaluasi penerapan dan pendayagunaan SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya SIM pendidikan berbasis web 	%/ sepanjang tahun	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Dalam kerangka implementasi program yang direkomendasikan dalam Renstra Pembangunan Pendidikan DIY Tahun 2014-2018 terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Beberapa prinsip kerangka implementasi tersebut adalah:

1. Mengikuti kerangka ikan yang ditampilkan pada bagian sebelumnya (Gambar 1), esensinya adalah bahwa ada lima kluster program/kegiatan, yang masing-masing memiliki **Indikator Kinerja Utama** (IKU) dan IKU tersebut merupakan sintesis dari beberapa capaian **Indikator Kinerja Kunci** (IKK) pada kluster yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian IKK akan berpengaruh terhadap pencapaian IKU.
2. Di dalam Implementasi setiap kebijakan, di samping memerlukan pendekatan struktural legal formal, juga dikembangkan pendekatan kultural, di mana ditumbuhkan pula budaya pendidikan yang sehat oleh dan untuk segenap komponen dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yakni peserta didik, pendidik, sistem birokrasi, orangtua, masyarakat, dan dunia kerja.
3. Penerapan yang tepat pendekatan struktural yang bersifat *top down*, dan pendekatan kultural yang bersifat *bottom up* memerlukan manajemen perubahan berbasis penelitian. Untuk itu di dalam renstra ini diprogramkan Penelitian dan Pengembangan (*R & D*) yang menghasilkan model-model inovatif sebelum suatu ide diterapkan secara luas. Di samping itu diprogramkan pula penelitian tindakan yang akan menghasilkan manfaat nyata pada tingkat kelas (*classroom action research*) dan atau pada tingkat satuan pendidikan (*institutional action research*).
4. Kluster pembangunan *good education governance* dalam hal ini tata kelola berbasis budaya di bidang pendidikan bertujuan memberikan support terhadap ke-empat kluster program/kegiatan yang lain. Aspek krusial dari penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan adalah mencakup penguatan hubungan kerja antara otoritas tingkat

DIY dengan otoritas tingkat kabupaten/kota dan otoritas instansi vertikal dari Kementerian Agama khususnya yang berurusan dengan madrasah (MI,MTs, MA), pendidikan agama di sekolah umum; dan tidak tertutup kemungkinan kerjasama dengan pendidikan keagamaan (pondok pesantren, pendidikan diniyah, majelis taklim, dsb). Dewasa ini bermunculan model pendidikan persekolahan/madrasah yang mengadopsi beberapa bagian dari model pondok pesantren, misalnya: *full day school*, *boarding school*, sekolah Islam Terpadu (IT), dan sebagainya.

5. Untuk mendukung terwujudnya tatakelola yang inovatif, dirintis manajemen berbasis pengetahuan dan sistem informasi manajemen yang handal. Hal ini sejalan dengan harapan terwujudnya *e-government*.
6. Sejalan dengan skema konsep perencanaan strategis, di mana diupayakan lahirnya kebijakan, program dan kegiatan yang memiliki nilai strategis yang berdampak luas mengangkat kinerja secara sistemik dan sinergis maka setiap pelaku dan pemangku kepentingan dalam pendidikan diharapkan mencurahkan perhatian lebih pada bagian yang memiliki nilai strategis tersebut, di samping mengawal dan mengamankan bagian yang bersifat rutin.
7. Sistem penganggaran menganut penganggaran berbasis program, sehingga tidak kehilangan kontrol terhadap aspek-aspek strategis dengan prinsip bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama (*cost sharing*) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas kebijakan, program dan penganggarannya.
8. Sesuai dengan sistem penganggaran tersebut berdasarkan dokumen renstra ini setiap tahun anggaran akan disusun rencana kerja tahunan yang lebih nyata dan operasional. Rencana tahunan ini sekaligus akan mampu mengakomodasi hal-hal yang tidak diduga terjadi di dalam kurun waktu implementasi renstra.

9. Pengembangan sumberdaya pendidikan yang mencakup unsur sarana-prasarana, SDM, dana, dan pengembangan program diorientasikan untuk secara sinergis menuju aktualisasi visi dan misi pendidikan DIY. Pola sinergi ini berlaku baik secara internal jajaran Dikpora DIY, maupun secara eksternal dengan jajaran pendidikan Kabupaten/Kota di DIY serta dengan satuan kerja terkait baik di tingkat DIY maupun kabupaten/kota.
10. Pengembangan jaringan kerjasama tingkat daerah, nasional, dan bahkan internasional sangat diperlukan. Dengan jaringan kerjasama tersebut dapat diisi dengan penyediaan layanan, berbagi sinergis dalam pemberian layanan atau persaingan sehat untuk memperoleh pengalaman dan pengakuan (rekognisi). Harapan untuk menjadi pusat acuan daerah lain hanya dapat terwujud kalau ada pengakuan dan kepercayaan atas prestasi dan kinerja pendidikan DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001